



KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA BISNIS

Oleh :

ABDUL AZIS RASYID
NIM : B. 102940050

**PROGRAM STUDI S2 (MAGISTER) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
1997**

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA
BISNIS**

Oleh :

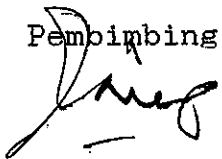
ABDUL AZIS RASYID
NIM : B.102940050

Tesis telah Dipertahankan di hadapan Dewan Penguji
Pada tanggal 24 Desember 1997

Tesis Tersebut Diterima Sebagai Sebagian Persyaratan
yang Diperlukan untuk Memperoleh Derajat Megister Bidang
Ilmu Hukum

Semarang,
Universitas Diponegoro
Program Studi S2 (Magister)
Ilmu Hukum

Pembimbing,



Ketua

Prof.Dr. Barda Nawawi Arief.SH

Prof. Purwahid Patrik.SH

PROGRAM STUDI S2 (MAGISTER) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
1997

KATA PENGANTAR

Syukur dan terima kasih penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala karunia dan bimbingannya, sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Bisnis" sebagai tugas akhir dalam penyelesaian studi pada Program Ilmu Hukum dan Sistem Peradilan Pidana, Pasca Sarjana (S2) Fakultas Hukum UNDIP.

Penulisan tesis ini didasarkan pada penelitian terhadap tiga permasalahan pokok yang diangkat dari judul tersebut di atas yaitu, bagaimana ruang lingkup tindak pidana bisnis yang diatur dalam KUHP dan di luar KUHP, seberapa jauh kasus-kasus bisnis yang terjadi selama ini yang diproses melalui peradilan pidana dan permasalahan hukum apa yang timbul dalam praktek sehubungan dengan penerapan kebijakan hukum pidana dan usaha atau kebijakan apakah yang dapat diambil dalam mengatasi kesenjangan yang timbul dalam praktek penegakan kebijakan hukum pidana tindak pidana bisnis.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa, tidak mudah untuk mengumpulkan bahan, literatur dan data yang berkaitan dengan ketiga permasalahan tersebut, kemudian mengkaji, menganalisis dan menyajikan dalam suatu kesatuan yang utuh dan terpadu, namun berkat bantuan banyak pihak, penulis akhirnya dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Oleh karena itu penulis merasa

berkewajiban untuk mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. H. Prwahid Patrik, SH. Selaku Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum UNDIP, karena masih berkenaan memberikan peluang menjadi mahasiswa Pascasarjana Fakultas Hukum UNDIP hingga mencapai tahap penyelesaian.
2. Bapak Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH, selaku pengasuh beberapa mata kuliah pada Program Pascasarjana dan sekaligus sebagai pembimbing dalam penulisan tesis ini, dimana di tengah-tengah kesibukannya telah berkenaan meluangkan waktunya untuk mengoreksi, memberikan pengarahan dan petunjuk sekaligus untuk menjadi nara sumber dalam memperoleh bahan-bahan yang sangat dibutuhkan untuk penulisan tesis ini. Terasa bahwa beliau telah membimbing dengan ketekunan, keteletian dan keramahan, bahkan beliau sendiri menawarkan beberapa literatur untuk dijadikan sumber sehingga mengurangi beban penulis dalam merampungkan penulisan ini.
3. Bapak Prof. Dr. Muladi, SH, yang pada waktu beliau menjadi Direktur Program Pascasarjana Fakultas Hukum UNDIP, telah memberikan informasi mengenai prosedur untuk menjadi mahasiswa Program S2 yang mana menjadi dorongan yang sangat kuat bagi diri penulis untuk menjadi mahasiswa Program S2 hingga mendekati penyelesaian studi.

4. Bapak Prof, Dr. Satjipto Rahardjo, SH, selaku dosen pengasuh beberapa mata kuliah dalam tiga semester berturut-turut telah memberikan banyak ilmu pengetahuan kepada penulis untuk menjadi teoritis hukum yang mampu memandang berbagai permasalahan hukum dengan menggunakan berbagai optik, terutama optik sosiologis.
5. Bapak Prof. Ronny Hanitijo Soemitro, SH, selaku pengasuh mata kuliah metode penelitian yang telah memberikan banyak bekal bagi penulis dalam hal yang berkaitan dengan penelusuran literatur hukum dan metodologi penelitian yang sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas-tugas selama mengikuti perkuliahan pada Program S2, terutama dalam menyelesaikan tesis ini.
6. Bapak Dr. I.S. Susanto, SH, selaku pengampu beberapa mata kuliah, telah membuka wawasan penulis, bahwa hukum itu tidak hanya dipandang secara klasifik, tetapi harus dipandang secara keseluruhan (komplek), termasuk proses pembuatan undang-undang dan proses bekerjanya hukum dengan demikian harus menggunakan kajian kritis terhadap hukum.
7. Bapak Prof. Sahardjo, SS, SH, yang telah memberikan bekal kepada penulis melalaui mata kuliah "Filsafat Hukum" dan "Kebijakan Hukum Publik" dimana uraian-uraian beliau sangat berkaitan dengan objek penulisan

ini sehingga sangat membantu dan menunjang penyelesaian tesis ini.

8. Bapak-bapak dan ibu-ibu dosen lainnya serta staf administrasi Program Pascasarjana yang tidak sempat penulis menyebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam segala kekurangan, selama menjadi mahasiswa Pascasarjana pada Fakultas Hukum UNDIP.
9. Bapak Soemartono, SH, Kordinator KKL pada pengadilan Negeri Semarang, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mendapatkan data sewaktu penulis melakukan penelitian di pengadilan.
10. Bapak Soetrisno, SH Kepala Kejaksaan Negeri Semarang yang telah bersusah payah mengurus dan membantu penulis untuk mendapatkan data pada instansi yang dipimpinnya.
11. Bapak Drs. Tugas Dwi Apriyanto, SH, selaku Kepala Kepolisian Kota Besar Semarang yang telah banyak memberikan bahan dan masukan kepada penulis terutama mengenai penerapan undang-undang yang mengatur tindak pidana bisnis baik dalam KUHP maupun di luar KUHP.
12. Bapak Drs. Soemarsono, Kepala Kantor Wilayah Perindustrian dan Perdagangan Jawa Tengah telah memberikan rekomendasi dan izin untuk melakukan penelitian pada instansi yang dipimpinnya.
13. Kepada istriku Mariani, SH dan kedua anakku Moh. Adli Rasyid dan Azwar Rasyid yang dengan setia mendampingi penulis baik diwaktu senang maupun susah selama mengikuti pendidikan S2 di UNDIP Semarang.

Dan akhirnya dengan rendah hati, penulis mohon saran pendapat serta komentar dari Dewan penguji untuk memperbaiki dan menyempurnakan tesis ini, sehingga dapat lebih berbobot dan bermanfaat sebagai suatu sumbangan pemikiran untuk pengembangan dan pembaharuan hukum pidana di Indonesia, khususnya menyangkut tindak pidana bisnis.

ABSTRAK

Kebijakan legislatif dalam menanggulangi tindak pidana bisnis melalui undang-undang atau peraturan-peraturan hukum pidana adalah merumuskan perbuatan sebagai suatu perbuatan pidana yang harus ditanggulangi,, dan menetapkan sanksi pidana yang cocok bagi sipelaku atau calon pelaku tindak pidana bisnis.

Tahap kebijakan legislatif yang dapat disebut tahap formulasi, merupakan salah satu mata rantai dari perencanaan penegakan hukum khususnya merupakan bagian dari proses konkretisasi pidana. Dengan demikian untuk mencapai tujuan hukum pidana maka kebijakan legislatif (formulasi) tidak dapat dilepaskan dari kebijakan aplikasi yaitu kebijakan menerapkan peraturan yang telah dirumuskan dalam undang-undang. Dalam hubungan ini ternyata di dalam penelitian ditemukan bahwa kebijakan menetapkan dan merumuskan perbuatan dan sanksi pidana yang terdapat dalam KUHP dan di luar KUHP, dapat dikatakan cukup memadai, walaupun masih ada kelemahan-kelemahan khususnya yang terdapat di dalam KUHP yaitu terbatasnya perilaku-prilaku yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana bisnis yaitu hanya pada kegiatan bisnis yang dilakukan dengan pemalsuan dan perbuatan curang. Begitu pula penetapan dan perumusan sanksi pidananya, umumnya pidana penjara yang dirumuskan secara tunggal serta pidana denda yang sangat rendah.

Tetapi yang paling memprihatinkan adalah penegakan kebijakan hukum pidana yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang tidak konstruktif seperti adanya pengaruh dari pelaku tindak pidana bisnis atau atasan penegak hukum agar tindak pidana bisnis tidak diproses sebagaimana mestinya atau menurut kehendaknya. Selain itu, kurangnya koordinasi atau persepsi yang sama antara instansi terkait dengan penegak hukum maupun cara panegak hukum dalam menangani dan menerapkan peraturan-peraturan tindak pidana bisnis. Begitu pula kurangnya keberanian, tanggung jawab serta pengetahuan dalam menerapkan peraturan-peraturan bisnis yang tergolong masih baru. Keadaan tersebut menyebabkan terputusnya mata rantai antara kebijakan perumusan dan kebijakan penegakan peraturan tindak pidana bisnis, sehingga harapan untuk melindungi masyarakat dari tindak pidana bisnis melalui hukum pidana selama ini belum pernah terlaksana.

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|---------|
| KATA PENGANTAR | i |
| ABSTRAK | vi |
| DAFTAR ISI | vii |
| DAFTAR TABEL | ix |
| DAFTAR LAMPIRAN | x |
| BAB I. PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 9 |
| C. Tujuan Penelitian | 9 |
| D. Kegunaan Penelitian | 10 |
| E. Metode Penelitian | 10 |
| F. Sistematika Penulisan | 14 |
| BAB II. TINJAUAN PUSTAKA | |
| A. Hubungan Kebijakan Hukum Pidana Dengan Kebijakan Kriminal dan Kebijakan Sosial | 16 |
| B. Pengertian Dan Ruang Lingkup Tindak pidana Bisnis | 35 |
| C. Dimensi Perkembangan Tindak Pidana Bisnis | 42 |
| BAB III. PENYAJIAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN | |
| A. Kebijakan Legislatif dalam Menetapkan Dan Merumuskan perbuatan Dan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Bisnis.. | 50 |
| 1. Tindak Pidana Bisnis Dalam KUHP.... | 50 |
| 2. Tindak Pidana Bisnis Dalam Undang Undang di Luar KUHP dan UU-TPE | 65 |

| | |
|--|-----|
| B. Penegakan Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Bisnis | 82 |
| 1. Gambaran Umum Tindak Pidana Bisnis Yang Terjadi | 85 |
| 2. Sikap dan Pengetahuan Penegak Hukum Menegakan Hukum Pidana Bisnis | 96 |
| C. Prospek Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Bisnis Dimasa Mendatang | 102 |
| BAB IV. PENUTUP | |
| A. Kesimpulan | 116 |
| B. Saran | 122 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

| Tabel | Halaman |
|--|---------|
| I. Jenis-jenis Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Bisnis dalam KUHP | 59 |
| II. Bobot Sanksi Pidana terhadap Tindak Pidana Bisnis Dalam KUHP | 62 |
| III. Kategori Tindak Pidana Bisnis Menurut Lama/Beratnya Sanksi Pidana | 63 |
| IV. Jenis Sanksi Pidana yang Ditetapkan Dalam Undang-undang di Luar KUHP | 74 |
| V. Perumusan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Bisnis Dalam Undang-Undang di Luar KUHP | 76 |
| VI. Berat/Lamanya Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Bisnis yang Ditetapkan Dalam Undang-Undang di Luar KUHP | 79 |
| VII. Bobot Tindak Pidana Bisnis dan Sanksi Pidana Maksimum | 81 |
| VIII. Jenis Tindak Pidana Bisnis dan Peraturan yang Dilanggar | 85 |
| IX. Tindak Pidana Bisnis yang Terdaftar dan Diproses Oleh Penegak Hukum | 87 |
| X. Sikap Penegak Hukum dalam Memproses Perkara Tindak Pidana Bisnis | 98 |
| XI. Pengetahuan Penegak Hukum Terhadap Proses Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana Bisnis.. | 100 |

DAFTAR LAMPIRAN

| | Halaman |
|---|---------|
| Lampiran 1. Surat Izin Penelitain Bappeda Tingkat I Jawa Tengah | |
| Lampiran 2. Surat Keterangan Penelitian dari Pengadilan Negeri Semarang | |
| Lampiran 3. Surat Keterangan Penelitian dari Kejaksaan Negeri Semarang | |
| Lampiran 4. Surat Keterangan Penelitian dari Polisi Kota besar Semarang | |
| Lampiran 5. Surat pemberitahuan telah melakukan riset dari kantor Perindustrian dan Perdagangan Jawa Tengah | |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kalau membicarakan hukum bisnis, maka dominasi pikiran kita tertuju pada hukum dagang dan hukum perdata. Hal ini disebabkan pengertian bisnis sendiri adalah usaha dagang, selain itu hukum bisnis umumnya mengatur tentang perusahaan (industri), produksi dan jual beli barang dan jasa. Akan tetapi perkembangan pelaksanaan bisnis itu sendiri seperti bidang produksi, distribusi, pemasaran dan segala akibat yang ditimbulkannya, menghendaki agar hukum pidana berperan serta dalam hukum bisnis.

Keterlibatan hukum pidana dalam dunia bisnis, didasarkan pada kebijakan pembangunan yang tercantum dalam TAP MPR No. II/MPR 1993 Tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara yang mengatakan :

"Pembangunan hukum diarahkan pada makin terwujudnya sistem nasional yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang mencakup pembangunan materi hukum, aparatur hukum serta sarana dan prasarana hukum dalam rangka pembangunan negara hukum untuk menciptakan masyarakat yang aman dan tentram"¹⁾.

1). Tap MPR No. II/MPR/1993 Tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara, hal. 94

Sesuai dengan kebijakan pembangunan tersebut di atas, maka hukum pidana dalam dunia bisnis, diarahkan kepada perlindungan atau penjamin rasa keamanan dan ketentraman bagi warga masyarakat untuk menjalankan usahanya dan menikmati hasil perusahaannya tersebut, atau dengan kata lain apabila KUHD dan KUH Perdata dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum yang kokoh dalam upaya pengaturan, pembinaan dan pengembangan bisnis secara luas, maka hukum pidana memberikan jaminan agar bisnis tersebut dijalankan sebagaimana mestinya.

Undang-Undang Dasar 1945 dan Garis-Garis Besar Haluan Negara secara tegas pula menunjukkan bahwa dalam kegiatan ekonomi termasuk industri, harus dihindarkan timbulnya "etatisme dan sistem free fight liberalism". oleh karena itu keterlibatan hukum pidana secara luas dalam kegiatan bisnis tidak berarti pemerintah lebih mementingkan kepentingan negara dari pada rakyatnya, akan tetapi justru pemerintah hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Inilah yang menjadi garis besar kebijakan hukum pidana terhadap bisnis dimana perlindungan terhadap pengusaha kecil harus tetap dijamin, jangan mereka menjadi korban persaingan tidak sehat dari pengusaha-pengusaha besar, nasional maupun pengusaha asing. Begitu pula perlindungan terhadap masyarakat dari kerugian yang ditimbulkan oleh perusahaan.

Peranan hukum pidana dalam dunia bisnis selama ini dapat dikatakan masih kurang dan sangat terbatas, yaitu masih mengutamakan sanksi pidana, pada hal hukum pidana selain menetapkan sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada sipelaku, juga menetapkan perbuatan apa yang dapat dipidana dan bagaimana melaksanakan hukum pidana itu.

Perlu pula diketahui bahwa, selain hukum pidana normatif positif yang mempelajari hukum pidana yang saat ini berlaku (*ius constitutum*), terdapat pula hukum pidana yang mempelajari bagaimana sebaiknya hukum pidana yang akan datang (*ius constituendum*). Oleh karena itu memberikan peranan lebih luas kepada hukum pidana dalam menertibkan pelaksanaan bisnis adalah kebijakan yang paling tepat, mengingat kondisi bisnis sekarang ini sedang menghadapi era globalisasi, dimana tingkah laku-tingkah laku bisnis tidak hanya bersifat nasional tetapi sudah bersifat transnasional yang tentunya akan memunculkan masalah-masalah baru dalam dunia bisnis.

Menurut Sunaryati Hartono yang dikutip T. Mulyana Lubis bahwa, "Pada tingkat domestikpun lalu lintas ekonomi membawa persoalan-persoalan baru yang harus dipecahkan dengan jawaban-jawaban yang baru pula. Banyak peristiwa ekonomi yang dulu tidak kita jumpai dan sekarang hadir di tengah kita"²⁾.

2). T. Mulyana Lubis, *Hukum dan Ekonomi*, (Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1992), hal. 13

Selanjutnya Sunaryati Hartono mengatakan bahwa. "Semua ini tidak diatur dalam ketentuan hukum kita. Kalaupun ada ketentuan yang mengatur, maka ketentuan tersebut sangat sumir dan sering tidak bisa menyelesaikan persoalan-persoalan sekarang, kasus persaingan tidak sehat sukar sekali diselesaikan semata-mata dengan memakai Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata³⁾).

Data yang valid mengenai frekuensi kejahatan bisnis belum dapat diketahui secara pasti, akan tetapi terdapat gejala bahwa kejahatan bisnis cenderung meningkat, seiring dengan perkembangan perusahaan (industri) itu sendiri.

Di Indonesia perkembangan perusahaan ditandai dengan dikeluarkannya beberapa kebijakan pemerintah antara lain, kebijakan di bidang moniter, perbankan dan keuangan untuk meningkatkan atau mengembangkan perekonomian melalui kegiatan berbagai bidang usaha.

Kebijakan pemerintah tersebut mengakibatkan maraknya peningkatan jumlah perusahaan, baik perusahaan kecil, maupun perusahaan besar, yang pada gilirannya akan menimbulkan kompetisi untuk mencari pasaran seluas-luasnya agar barang produksinya dapat laku (terjual) sebanyak-banyaknya.

Perkembangan perusahaan sebagaimana digambarkan di atas, dapat lebih pesat lagi apabila dihubungkan

3). Ibid. hal. 14

dengan tingkat kebutuhan masyarakat dewasa ini yang semakin bertambah. baik kualitas maupun kuantitas. Dan dapat dikatakan bahwa hanya perusahaan industrilah yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara cepat dan dalam jumlah yang cukup banyak.

Melihat hubungan antara perusahaan (industri) dengan kebutuhan masyarakat, maka ternyata betapa besar peranan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Bahkan peranan itu tidak hanya memenuhi hajat masyarakat yang ada di kota-kota besar, akan tetapi juga masyarakat yang ada di pedesaan.

Mengingat penduduk Negara Republik Indoensia sebahagian besar berada di pedesaan, maka dengan pertumbuhan tingkat ekonomi tertentu, tidak menutup kemungkinan pedesaan akan menjadi pangsa pasar yang cukup tinggi bagi para pengusaha untuk memasarkan produksinya. Dalam keadaan demikian dapat menimbulkan konsekuensi negatif bagi masyarakat pedesaan, karena umumnya mereka mempunyai tingkat pendidikan (pengetahuan) yang masih rendah sehingga dapat menjadi sasaran yang empuk bagi perusahaan-perusahaan yang bersaing.

Memang diakui bahwa pengembangan perusahaan bukanlah merupakan kejahatan bisnis, akan tetapi dapat menjadi faktor timbulnya kejahatan bisnis. Adanya hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan kejahatan bisnis, terlihat dari pendapat Marshall N. Clinard dan Peter C. Yeager yang mengatakan :

"Dalam pembangunan yang skalanya semakin luas (termasuk pembangunan ekonomi - pen) disertai perubahan atau pergeseran sosial yang ditandai dengan berbagai fenomena sosial, yang dalam proses pembentukannya cenderung pada suatu saat kawasan tertentu, mendorong terjadinya berbagai kejahatan baik oleh warga masyarakat pada strata bawah maupun strata atas"⁴⁾.

Indonesia dan pengembangan perusahaan (industri) tidak dapat dipisahkan, hal ini disebabkan pertambahan penduduk yang cukup tinggi sehingga potensi-potensi agraris yang selama ini diandalkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak dapat diharapkan lagi. Oleh karena itu kehadiran dan perkembangan perusahaan (industri) sangat diharapkan untuk memenuhi kebutuhan orang banyak. Bahkan dengan perkembangan perusahaan-perusahaan akan memberikan keuntungan kepada masyarakat dan negara seperti kemungkinan terciptanya kompetisi dari perusahaan, terutama bila behadapan dengan pesaing dari negara lain, meningkatkan penerimaan pajak negara, membuka kesempatan kerja dan sebagainya. Akan tetapi dibalik keuntungan-keuntungan yang diperoleh dari perkembangan perusahaan, dapat pula menimbulkan akibat-akibat negatif, seperti timbulnya persaingan curang, menumpuk barang untuk menaikkan harga, monopoli untuk mematikan perusahaan lainnya.

Akibat-akibat negatif dari pertumbuhan ekonomi seperti tersebut di atas, biasanya pemerintah

4). Soedjono Dirdjosisworo, *Kejahatan Bisnis (Orientasi dan Konsep)*, (Bandung, Mandar Maju, 1994), hal. 25

melakukan berbagai tindakan untuk menanggulangnya melalui politik kriminal. Kantibmas dan Hankamnas. Salah satu upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan serta upaya perbaikan pelaku kejahatan adalah dengan hukum pidana. Namun gejala-gejala negatif seperti tersebut di atas tetap menimbulkan kekhawatiran. karena hukum pidana yang dibuat dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat (social defence) belum dapat memberikan perlindungan kepada perusahaan lain dan masyarakat konsumen dari kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan bisnis.

Bertolak dari uraian di atas, menarik untuk diteliti dan dikaji seberapa jauh kebijakan hukum pidana yang tertuang dalam KUHP maupun di luar KUHP sudah merupakan sarana yang memadai untuk menghadapi perkembangan kejahatan bisnis saat ini maupun dimasa yang akan datang.

Pokok permasalahan diarahkan pada masalah menetapkan dan merumuskan perbuatan apa yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan bisnis dan jenis sanksi apa yang ditetapkan untuk mengantisipasi perkembangan kejahatan bisnis.

Pemilihan pokok permasalahan seperti tersebut di atas berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku sekarang dibuat sejak tahun 1915 atau 81 tahun yang lalu oleh Pemerintah Belanda, sementara perilaku bisnis yang berkembang di Indonesia jauh

lebih pesat dari pada perilaku bisnis yang ada pada waktu KUHP dibuat. Oleh karena itu sangat beralasan apabila pengaturan tindak pidana bisnis di dalam KUHP dan di luar KUHP ditinjau kembali, sebagai bagian dari usaha pembaharuan hukum.

2. Menetapkan dan merumuskan (memformulasikan) perbuatan apa yang sepatutnya dikategorikan sebagai kejahatan bisnis, sangat relevan dengan perkembangan globalisasi ekonomi saat ini. Dengan demikian pengkajian hukum pidana terhadap kejahatan bisnis, tidak hanya menyangkut perbuatan bisnis apa yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana bisnis sekarang, tetapi juga pada masa yang akan datang.
3. Sanksi pidana yang diancamkan terhadap pelanggaran dan kejahatan bisnis yang ada di dalam KUHP dan di luar KUHP pada umumnya adalah sanksi pidana penjara, pada hal jenis sanksi ini kurang disukai, oleh karena itu dari segi politik kriminal patut dipermasalahkan alasan yang menjadi dasar pertimbangan diancamkannya pidana penjara terhadap pelaku-pelaku kejahatan bisnis.
4. Pengkajian dan penilaian kembali masalah penetapan mengenai perbuatan dan sanksi pidana sehubungan dengan kejahatan bisnis dalam perundang-undangan sangat diperlukan, karena meningkatnya kejahatan bisnis di Indonesia. Meningkatnya tindak pidana bisnis dapat menjadi tolok ukur tidak tepatnya kebijakan hukum pidana yang ada sekarang ini.

B. Perumusan Masalah

Bertolak dari uraian latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan pokok dalam tulisan ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana ruang lingkup kebijakan hukum pidana yang ada dalam KUHP dan di luar KUHP dalam upaya menanggulangi kejahatan bisnis.
2. Seberapa jauh kasus-kasus bisnis yang terjadi selama ini yang diproses melalui peradilan pidana dan permasalahan hukum apakah yang timbul dalam praktek sehubungan dengan penerapan kebijakan hukum pidana tersebut ?
3. Usaha atau kebijakan apakah yang dapat diambil di dalam mengatasi kesenjangan yang timbul di dalam praktek penegakan kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana bisnis.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan mengenai kebijakan legislatif terhadap tindak pidana bisnis baik yang terdapat dalam KUHP maupun yang ada di luar KUHP.
2. Untuk mengetahui permasalahan yang ada dalam praktek, dan kebijakan apa yang dapat diambil oleh badan legislatif untuk mengantisipasi tindak pidana bisnis.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai :

1. Penambah hasanah referensi ilmu hukum yang berkaitan dengan kebijakan hukum pidana terhadap perbuatan bisnis menyimpang.
2. Bahan masukan kepada pemerintah (legislatif) dalam membuat dan menyusun peraturan-peraturan hukum pidana untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari tindak pidana bisnis.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dalam wilayah Kotamadya Semarang. Lokasi yang ditetapkan sebagai sampel adalah, Kantor Kepolisian Kotabes Semarang, Kantor Kejaksaan, Kantor Pengadilan Negeri dan Kantor Wilayah Perindustrian dan Perdagangan.

Pemilihan Kotamadya Semarang sebagai tempat penelitian, didasarkan atas alasan sebagai berikut :

- a. Kotamadya Semarang adalah Kota Administratif, pemerintahan dan kota perdagangan (bisnis).
- b. Kotamadya Semarang sebagai Ibu Kota Jawa Tengah adalah daerah kedua terpadat penduduknya setelah Ibu Kota Jawa Timur (Surabaya).
- c. Beberapa kasus kejahatan bisnis sering terjadi di Kotamadya Semarang, seperti bisnis Iklan

Tender Fiktif. Kasus P.T. Leo Agung Raya Semarang, dan Kasus P.T. Indo Decor Primantara Industri (IDPI).

2. Pendekatan Masalah

Penulis mengacu pada pendapat Ronny Hanitijo Soemitro yang mengatakan bahwa, "setiap ilmu pengetahuan mempunyai identitasnya sendiri-sendiri, sehingga selalu akan terdapat perbedaan. Metodologi penelitian yang diterapkan dalam setiap ilmu, selalu disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya"⁵⁾. Oleh karena obyek penelitian ini adalah mengenai masalah kebijakan hukum pidana maka pendekatannya tidak dapat dilepaskan dari pendekatan yuridis normatif. Disamping itu untuk menunjang pendekatan yuridis normatif tersebut, diperlukan pula pendekatan yuridis empiris, terutama untuk melihat gambaran nyata di dalam fase penegakan kebijakan hukum pidana terhadap penyelesaian kasus-kasus kejahatan bisnis.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis data

Jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, akan tetapi terutama lebih difokuskan pada data sekunder karena sifat penelitian ini adalah

5). Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 1988), hal 9

normatif sehingga data primer lebih bersifat penunjang.

b. Sumber data

Untuk data sekunder diperoleh melalui bahan-bahan hukum, baik yang bersumber dari bahan hukum primer seperti perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan yang menyangkut kejahatan bisnis maupun yang bersumber pada bahan hukum sekunder seperti rancangan undang-undang, hasil karya ilmiah dan laporan-laporan penelitian. Sedangkan untuk data primer diperoleh melalui wawancara dengan aparat penegak hukum dan pegawai kantor wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan, untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan tindak pidana bisnis.

4. Penentuan Sampel Penelitian

Berhubung keterbatasan waktu, biaya dan tenaga, maka tidak akan dilakukan penelitian terhadap semua aparat penegak hukum dan pegawai (populasi) yang bekerja pada instansi dimana penelitian ini dilakukan, tetapi dilakukan terhadap sebagian dari populasi yang ditentukan dengan purposive sampling. Mengenai hal tersebut dikemukakan oleh Ronny Hanitijo Soemitro bahwa, "Dalam suatu penelitian, sebenarnya tidak perlu untuk meneliti semua obyek, semua gejala atau semua individu atau semua kejadian atau semua unit

tersebut untuk dapat memberi gambaran yang tepat dan benar mengenai keadaan populasi itu. Tetapi cukup diambil sebagian saja untuk diteliti sebagai sampel. Pemilihan responden didasarkan atas pengetahuan atau pengalaman menangani atau menyelesaikan kasus-kasus kejahatan bisnis, dengan perincian sebagai berikut :

| | |
|--|-------------------|
| a. Polisi | = 3 orang |
| b. Jaksa | = 3 orang |
| c. Hakim | = 3 orang |
| d. Pejabat Kanwil Perindustrian dan Perdagangan | = 3 orang |
| Jumlah | <u>= 12 orang</u> |

5. Teknik Pengumpulan Data

Mengingat penelitian ini memusatkan perhatian pada data sekunder, maka pengumpulan data terutama ditempuh melalui teknik penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan pengadilan menyangkut kejahatan bisnis. Rancangan KUHP baru, data arsip atau data resmi lainnya dari instansi dan laporan tahunan yang terdapat pada kantor wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan, Kotabes, Kejaksaan dan Pengadilan serta karya ilmiah dan Laporan-laporan Penelitian.

Sedangkan untuk mendapatkan data primer, dilakukan dengan mewawancarai beberapa aparat penegak hukum dan beberapa pejabat dari Kanwil Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

6. Analisis Data

Data yang diperoleh dan telah disusun secara sistematis, selanjutnya dianalisis. Dalam penelitian ini, penulis memilih metode analisis data secara kualitatif, dengan memaparkan atau mendiskripsikan data penelitian yang disajikan dalam tabel secara apa adanya.

F. Sistematika Penulisan

Tesis ini seluruhnya terdiri atas 4 (empat) bab dengan penjelasan sebagai berikut :

Setelah uraian Bab satu ini, maka pada Bab dua dikemukakan berbagai tinjauan pustaka mengenai hubungan antara kebijakan hukum pidana dengan kebijakan kriminal dan hubungan antara kebijakan kriminal dengan kebijakan sosial, pengertian dan ruang lingkup tindak pidana bisnis dan dimensi perkembangan kejahatan bisnis.

Sedangkan Bab tiga, merupakan penyajian dan analisis hasil penelitian yang difokuskan pada kebijakan legislatif dalam menetapkan dan merumuskan perbuatan dan sanksi pidana yang berhubungan dengan tindak pidana bisnis, baik yang terdapat dalam KUHP maupun di luar KUHP, penegakan kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana bisnis di dalam praktek peradilan dan gambaran mengenai prospek kebijakan hukum pidana dimasa mendatang.

Bab empat yaitu, bab terakhir dari tesis ini (Bab penutup) memuat kesimpulan dari seluruh pembahasan hasil penelitian dan saran yang relevan dengan kesimpulan tersebut.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hubungan Kebijakan Hukum Pidana dengan Kebijakan Kriminal dan Kebijakan Sosial

Sebelum kita memasuki pembahasan hubungan antara kebijakan hukum pidana dengan kebijakan kriminal dan kebijakan sosial, terlebih dahulu dikemukakan mengenai pengertian ketiga kebijakan tersebut.

Kebijakan hukum pidana dapat disebut dengan istilah politik hukum pidana, selain itu sering pula dikatakan "penal policy", "criminal law policy" atau "strafrachtpolitiek". Kebijakan hukum pidana dapat dilihat sebagai bagian dari politik hukum, mengandung arti bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik¹⁾

Pengertian seperti tersebut di atas, terlihat pula dalam definisi "penal policy" dari Merc Ancel yang mengatakan sebagai berikut :

"Penal policy adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan".²⁾

1). Berda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 1996), hal. 28.

2). Ibid, hal 23

Bertolak dari kedua pengertian tersebut di atas maka, kebijakan hukum pidana terdiri dari 3 (tiga) tahap kebijakan yaitu tahap perumusan peraturan, tahap penerapan dan tahap pelaksanaan putusan pengadilan. Pentahapan kebijakan hukum pidana tersebut oleh Barda Nawawi Arief disebut sebagai tahap-tahap perwujudan kebijakan dengan mengatakan :

"..... apabila perwujudan suatu sanksi pidana hendak dilihat sebagai suatu kesatuan proses dari perwujudan kebijakan melalui tahap-tahap yang direncanakan sebelumnya, yaitu tahap formulasi oleh pembuat undang-undang, tahap seleksi oleh pengadilan dan tahap eksekusi oleh aparat pelaksana pidana "3).

Dalam kesempatan lain beliau mengatakan, "Dilihat sebagai suatu kesatuan proses, maka tahap kebijakan legislatif merupakan tahap yang paling strategis. Dari tahap kebijakan legislatif inilah diharapkan adanya suatu garis pedoman untuk tahap-tahap berikutnya" 4). Untuk itu dalam pengertian ini, perlu pula kita meninjau tugas dan fungsi pembuat undang-undang (badan legislatif) pada tahap formulasi ini.

Menurut Roeslan Saleh bahwa "Pembentuk Undang-undang tidak hanya menetapkan tentang perbuatan-perbuatan yang dapat dikenai hukum pidana, tetapi juga menunjuk macam-macam sanksi yang dapat

-
- 3). Barda Nawawi Arief, Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara, (Semarang, CV. Ananta, 1994). Hal. 4.
 - 4). Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana, (Bandung, Alumni, 1992). hal. 173.

diterapkan, begitu pula maksimum ukuran pidananya⁵⁾. Mengenai tugas atau fungsi pembuat undang-undang dalam tahap ini, lebih diperinci oleh Barda Nawawi Arief sebagai berikut :

- "Perencanaan atau kebijakan penanggulangan kejahatan yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan secara garis besar meliputi :
- a. Perencanaan atau kebijakan tentang perbuatan-perbuatan terlarang apa yang akan ditanggulangi karena dipandang membahayakan atau merugikan.
 - b. Perencanaan atau kebijakan tentang sanksi apa yang dapat dikenakan terhadap pelaku perbuatan terlarang itu (baik berupa pidana atau tindakan dan sistem penerapannya).
 - c. Perencanaan atau kebijakan tentang prosedur atau mekanisme sistem peradilan pidana, dalam rangka proses penegakan hukum pidana.⁶⁾

Ternyata kebijakan hukum pidana pada tahap formulasi (penetapan dan perumusan perbuatan pidana serta penegakannya), merupakan tahap yang paling menentukan keberhasilan hukum pidana menanggulangi kejahatan, karena efektifitas hukum pidana dapat dipikirkan memang pada tahap ini yaitu dipertimbangkan serasional mungkin dengan tidak mengabaikan pertimbangan nilai. Sebagaimana yang dikatakan M. Cherif Bassiouni bahwa, "Dalam melakukan kebijakan hukum pidana diperlukan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (policy-oriented approach) yang lebih bersifat pragmatis dan rasional dan juga pendekatan

5). Roeslan Saleh, *Segi Lain Hukum Pidana*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 1984), hal. 18.

6). Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, (Bandung, Alumni, 1992), hal. 158-159.

yang berorientasi pada nilai (value-judgment approach)"⁷⁾

Sebagaimana halnya dengan kebijakan hukum pidana, maka kebijakan kriminal biasa disebut politik kriminal atau dapat pula disebut dengan "criminal policy".

Kebijakan kriminal menurut Marc Ancel adalah sebagai "*the rational organization of the control of crime by society*", sedangkan G. Peter Hoefnagels mengemukakan bahwa, "*Criminal policy is the rational organization of the social reactions to crime*"⁸⁾.

Jadi baik Marc Ancel maupun G. Peter Hoefnagels melihat kebijakan kriminal sebagai usaha rational dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Selanjutnya Sudarto mengemukakan tiga arti kebijakan kriminal dengan mengatakan bahwa :

"Politik kriminal ini dapat diberi arti sempit, lebih luas dan paling luas. Dalam arti sempit politik kriminal itu digambarkan sebagai keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana. Dalam arti yang lebih luas, ia merupakan keseluruhan fungsi dari aparat penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi, sedangkan dalam arti yang paling luas ia merupakan keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma central dari masyarakat"⁹⁾

7). Barda Nawawi Arief. Op.cit. hal. 44

8). Barda Nawawi Arief, Op.cit, hal. 2

9). Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung, Alumni, 1986), hal. 113-1114.

Selanjutnya beliau mengatakan bahwa melaksanakan politik kriminal berarti mengadakan pemilihan dari sekian banyak alternatif. Usaha penanggulangan kejahatan secara preventif sebenarnya juga bukan hanya bidang dari kepolisian saja, penanggulangan kejahatan dalam arti yang umum secara tidak langsung juga dilakukan tanpa menggunakan sarana pidana atau hukum pidana.

Sejalan dengan apa dikemukakan di atas, apabila dianalisis beberapa pendapat dari Barda Nawawi Arief yang dapat disimpulkan bahwa kebijakan kriminal sebagai usaha untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan, terdiri dari usaha melalui hukum pidana (penal) dan bukan hukum pidana (non penal). Jadi pada hakekatnya kebijakan kriminal sebagai usaha untuk menanggulangi kejahatan, tidak selalu menggunakan perangkat hukum pidana, tetapi mengusahakan pula penanggulangan yang bersifat preventif murni tanpa pidana asal saja masih dalam kerangka rasional. Sehubungan dengan itu, Radzinowicz mengatakan :

"Kebijakan kriminal harus mengkombinasikan bermacam kegiatan preventif itu dan mengaturnya sedemikian rupa sehingga membentuk suatu mekanisme tunggal yang luas dan akhirnya mengkordinasikan keseluruhannya itu kedalam suatu sistem kegiatan negara yang teratur"¹⁰⁾

Masih dalam kerangka kebijakan kriminal dalam hubungannya dengan rasionalitas, dikatakan bahwa

10). Barda Nawawi Arief, Op.cit, hal. 36

karakteristik dari suatu politik kriminal yang rasional tidak lain dari pada penerapan metode-metode yang rasional. Menurut G. Peter Hoefnagels, suatu politik kriminal harus rasional, kalau tidak demikian tidak sesuai dengan definisinya sebagai "a rational total of the responses to crime".

Selanjutnya pengertian kebijakan sosial, dikemukakan oleh beberapa sarjana antara lain, Derbyshire yang menyamakan antara kebijakan sosial dengan kebijakan publik yang penulis simpulkan dari pendapatnya yang mengatakan bahwa, "kebijakan publik sebagai sekumpulan rencana kegiatan yang dimaksudkan untuk memberikan efek perbaikan terhadap kondisi-kondisi sosial dan ekonomi". Demikian pula Rose yang mengatakan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian pemilihan tindakan pemerintah (termasuk pilihan untuk tidak bertindak) guna menjawab tantangan yang menyangkut kehidupan masyarakat¹¹⁾.

Apabila kebijakan publik (kebijakan sosial) dipandang sebagai serangkaian pilihan tindakan pemerintah untuk menjawab tantangan atau memecahkan masalah kehidupan masyarakat sebagaimana dikemukakan di atas, maka kebijakan sosial dimaksud adalah masalah lingkungan, bukan orang-orang atau lembaga yang berada di sekitar dan mempengaruhi pemerintah selaku penentu

11). Samudra Wibawa. Kebijakan Publik. (Jakarta. Intermedia, 1994), hal. 49-50.

akhir suatu kebijakan (pelaku kebijakan), melainkan lebih menunjuk pada bidang-bidang kehidupan masyarakat yang dapat atau perlu dipengaruhi oleh pelaku kebijakan seperti demokrasi, pengangguran, kriminilitas, efisiensi dan produktivitas kerja, pencemaran alam, urbanisasi, diskriminasi, ketimpangan distribusi pendapatan dan sebagainya.

Kebijakan sosial di Indonesia telah ditetapkan dalam TAP MPR Nomor II tahun 1993 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara yang secara garis besarnya dikemukakan sebagai berikut :

"Upaya pencapaian sasaran umum pembangunan jangka panjang kedua diselenggarakan melalui tujuh bidang pembangunan yaitu bidang ekonomi, bidang agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, bidang hukum, bidang politik aparatur negara, penerangan, komunikasi dan media massa serta bidang pertahanan dan keamanan.¹²⁾

Hal tersebut di atas merupakan kebijakan sosial atau pembangunan nasional yang penjabarannya dapat dilihat dalam beberapa kebijakan pemerintah (eksekutif), baik yang berbentuk peraturan-peraturan, instruksi-instruksi dan surat-surat edaran.

Berdasarkan pengertian kebijakan hukum pidana, kebijakan kriminal dan kebijakan sosial tersebut di atas, maka berikut ini dikemukakan hubungan ketiganya :

12). UUD 1945, P4 dan GBHN (TAP MPR No. II/MPR/1993, hal. 66

1. Hubungan kebijakan Hukum Pidana dengan Kebijakan Kriminal

Telah dikemukakan pada halaman terdahulu bahwa, kebijakan kriminal adalah suatu usaha rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Usaha ini dapat dilihat dalam bentuk penggunaan hukum pidana (penal) dan bukan hukum pidana (non penal). Dengan demikian kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan kriminal.

Hubungan antara kebijakan hukum pidana dengan kebijakan kriminal adalah sangat penting, karena selama ini yang menjadi dasar untuk mengatakan suatu perbuatan sebagai perbuatan pidana adalah undang-undang hukum pidana (asas legalitas). Oleh karena itu sampai dimana kebijakan kriminal dapat melindungi masyarakat dari perbuatan-perbuatan jahat sangat tergantung dari sejauh mana undang-undang melihat perbuatan itu sebagai perbuatan yang mengganggu masyarakat. Pada hubungan ini, maka peranan pembuat undang-undang (legislatif) untuk melindungi masyarakat dari perbuatan-perbuatan jahat semakin besar, karena pembuat undang-undang tidak hanya menetapkan perbuatan-perbuatan yang sudah dipandang sebagai kejahatan, tetapi juga menetapkan perbuatan-perbuatan yang selayaknya sudah dapat dikategorikan sebagai kejahatan. Hal ini dikatakan oleh Roeslan Saleh bahwa :

"Dengan menggunakan istilah teknis dalam perundang-undangan dikatakan bahwa tugas pembentuk undang-undang tidak lagi semata-mata mengadakan kondifikasi melainkan juga modifikasi"¹³⁾.

Suatu perbuatan yang dahulu tidak dipandang sebagai perbuatan pidana oleh undang-undang hukum pidana. akan tetapi sekarang ini mungkin sudah harus dimasukkan sebagai perbuatan pidana karena dianggap mengganggu masyarakat.

Dalam laporan hasil Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional 1980 di Semarang dinyatakan :

"Masalah kriminalisasi dan dekriminalisasi atas suatu perbuatan haruslah sesuai dengan politik kriminal yang dianut oleh bangsa Indonesia. yaitu sejauh mana perbuatan tersebut bertentangan atau tidak bertentangan dengan nilai-nilai fundamental yang berlaku dalam masyarakat dan oleh masyarakat dianggap patut atau tidak patut dihukum dalam rangka menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat"¹⁴⁾

Dalam laporan simposium tersebut di atas, selanjutnya dinyatakan pula kriteria kriminalisasi dan dekriminalisasi sebagai berikut :

"Untuk menetapkan suatu perbuatan itu sebagai tindakan kriminal. perlu memperhatikan kriteria umum sebagai berikut :

1. Apakah perbuatan itu tidak disukai atau dibenci oleh masyarakat karena merugikan, atau dapat merugikan, mendatangkan korban, atau dapat mendatangkan korban.
2. Apakah biaya mengkriminalisasi seimbang dengan hasilnya yang akan dicapai, artinya cost pembuatan undang-undang, pengawasan dan penegakan hukum, serta yang dipikul oleh korban, pelaku dan pelaku kejahatan

13). Roeslan Saleh. Op.cit. hal. 42

14). Barda Nawawi Arief, Op.cit, hal. 39

- itu sendiri harus seimbang dengan situasi tertib hukum yang akan dicapai.
3. Apakah akan makin menambah beban aparat penegak hukum yang tidak seimbang atau nyata-nyata tidak dapat diemban oleh kemampuan yang dimilikinya.
 4. Apakah perbuatan-perbuatan itu menghambat atau menghalangi cita-cita bangsa Indonesia, sehingga merupakan bahaya bagi seluruh masyarakat¹⁵⁾.

Berdasarkan hasil simposium tersebut di atas, ternyata bahwa sebagai bagian dari kebijakan kriminal, maka dalam kebijakan hukum pidana (penal policy), pembuat undang-undang perlu mengetahui sistem nilai dan pandangan-pandangan yang hidup dalam masyarakat. Mengenai hal ini dikatakan pula oleh Sudarto. "Apabila hukum pidana hendak dilibatkan dalam usaha mengatasi segi-segi negatif dari perkembangan masyarakat/modernisasi, maka hendaknya dilihat dalam hubungan keseluruhan politik kriminal atau social defence planning, dan inipun harus merupakan bagian integral dari rencana pembangunan nasional¹⁶⁾.

Dalam kongres PBB tentang pencegahan kejahatan dan pembinaan sipembuat yang kelima (Fifth United Nation Congress on the Prevention of crime and the Treatment of Offender) yang diadakan di Jenewa tahun 1975, dikemukakan hal-hal yang menyangkut

15). Barda Nawawi Arief, Loc.cit.

16). Sudarto, Hukum Dan Hukum Pidana, (Bandung, Alumni, 1977). hal. 104.

pencegahan kejahatan di bidang perundang-undangan sebagai berikut :

*"All countries should strive constantly to reevaluate their criminal justice system in order to adapt them to current social needs. That implied the replacement of laws and institutions which either were not indigenous or had become antiquated"*¹⁷⁾.

(terjemahan bebasnya. Semua negara terus menerus harus berusaha mengevaluasi kembali sistem peradilan pidana untuk menyesuaikan dengan kebutuhan sosial sekarang, itu berarti mengganti peraturan-peraturan dan lembaga-lembaga yang tidak asli atau yang sudah kuno).

Menurut Roeslan Salah, pembentuk undang-undang tidak hanya menetapkan tentang perbuatan-perbuatan yang dapat dikenai hukum pidana, tetapi juga menunjuk macam-macam sanksi yang dapat diterapkan¹⁸⁾. Sehubungan dengan itu, S Balakrishnan mengatakan, "Hukum pidana sedang berubah dan memang seharusnya memerlukan perubahan sesuai dengan perubahan masyarakat. Perubahan ini tidak hanya mengenai perbuatan apa yang merupakan atau dinyatakan sebagai kejahatan, tetapi juga mengenai apa yang seharusnya dijadikan pidana untuk suatu kejahatan, karena gagasan mengenai pidana juga telah berubah sesuai dengan perubahan-perubahan itu sendiri, terutama mengenai pandangan

17). Sudarto. *Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat*. (Bandung, Sinar-Baru, 1983), hal. 69.

18). Roeslan Salah. *op.cit.* hal. 18.

hidup tentang moral dan kemasyarakatan"¹⁹⁾.

Menurut Barda Nawawi Arief bahwa, "kewajaran untuk melakukan peninjauan kembali terhadap kebijakan pidana selama ini, dapat pula dilihat dari sudut penegakan hukum, khususnya dari sudut mekanisme penanggulangan kejahatan. Kebijakan legislatif atau kebijakan perundang-undangan mengenai pidana, dilihat secara fungsional merupakan bagian dari mekanisme penanggulangan kejahatan. Oleh karena itu meningkatnya kejahatan dapat dilihat sebagai suatu petunjuk tidak tepatnya lagi kebijakan legislatif yang ditempuh"²⁰⁾.

Dalam hubungan itu, Manuel Lopez-Rey mengemukakan bahwa, "Kondisi suatu sistem pidana yang tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat, merupakan faktor yang mendukung meningkatnya kejahatan. Dinyatakan olehnya antara lain "sistem pidana saat ini tidak cocok dengan perkembangan masyarakat sekarang dan masa yang akan datang, yaitu pada umumnya telah usang dan jelas tidak adil, dan bahwa secara keseluruhan hal itu merupakan faktor yang menunjang peningkatan kejahatan"²¹⁾.

19). Barda Nawawi Arief, Op.cit. hal. 52.

20). Loc.cit.

21). Ibid. hal. 53

Adanya akibat negatif yang ditimbulkan dari ketidakcocokan antara pidana dan perbuatan yang dilakukan, maka dalam kebijakan hukum pidana sebagai usaha rasional untuk menanggulangi kejahatan perlu dipertimbangkan pidana itu dengan keadaan yang berkaitan dengan perbuatan, keadaan sipelaku dan tujuan pidana itu sendiri.

Dalam konsep Rancangan KUHP, hal tersebut nampak dalam butir-butir pedoman pemidanan berupa, kesalahan, pembuat, motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, cara melakukan tindak pidana, sikap batin pembuat, riwayat hidup dan keadaan sosial-ekonomi pembuat.

2. Hubungan Kebijakan Kriminal dengan Kebijakan Sosial

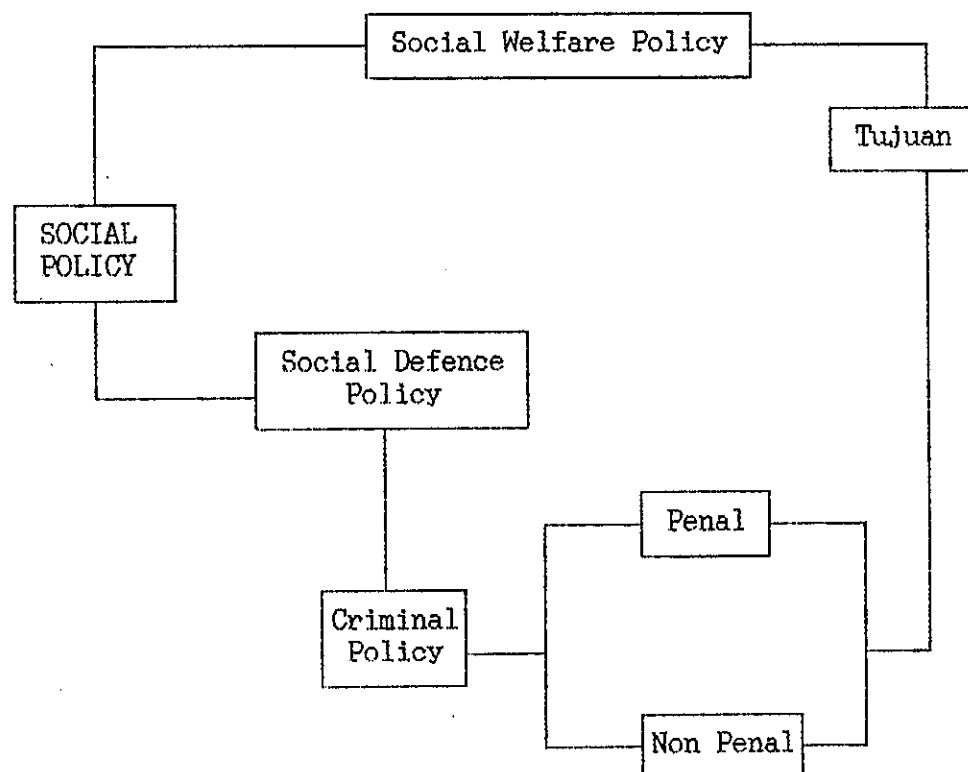
Telah dikemukakan bahwa kebijakan sosial adalah serangkaian pilihan tindakan pemerintah untuk menjawab tantangan atau memecahkan masalah kehidupan masyarakat. Salah satu tantangan (masalah) yang perlu dipecahkan atau ditanggulangi adalah masalah kejahatan atau tindakan kriminal, karena menghambat pencapaian kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana yang dikatakan oleh Saparinah Sadli bahwa :

"Prilaku menyimpang itu merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial, dapat menimbulkan ketegangan sosial, dan merupakan ancaman riil atau potensial bagi berlangsungnya ketertiban sosial"²²⁾.

22). Ibid. hal. 11

Salah satu usaha untuk menanggulangi kejahatan itu adalah melalui kebijakan kriminal dengan sarana hukum pidana (penal) dan bukan hukum pidana (non penal). Dengan demikian kebijakan kriminal merupakan bagian dari kebijakan sosial dan kebijakan hukum pidana sekaligus menjadi bagian pula dari kebijakan sosial.

Hubungan antara kebijakan sosial dengan kebijakan kriminal dan kebijakan hukum pidana, dapat dilihat dalam skema sebagai berikut :²³⁾.

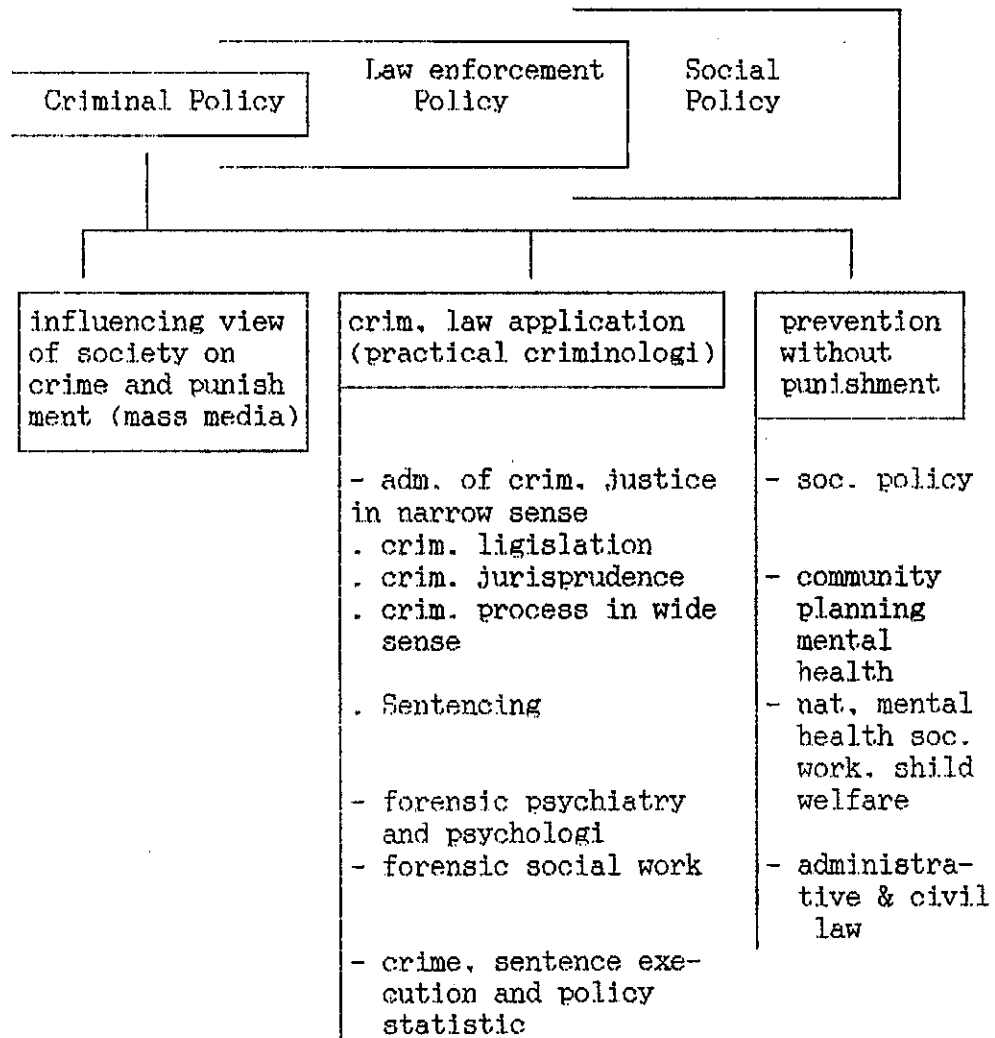


23). Berda Nawawi Arief, Kebijakan Kriminal, (Kriminal Policy) Bahan Penataran Kriminologi, Bandung, FH-Universitas Katholik Parahyangan, 9-13 September 1991, hal. 3.

Sehubungan dengan skema di atas. G. Peter Hoefnagel juga mengemukakan :

"Criminal policy as a science of policy is part of a larger policy : the law enforcement policy the legislative and enforcement policy is in turn part of social policy"²⁴⁾.

Berdasarkan uraian G. Peter Hoefnagel, memberikan skema sebagai berikut :²⁵⁾.



24). Loc.cit.

25). Ibid, hal. 4.

Skema di atas dengan jelas menunjukkan bahwa politik kriminal (criminal policy) adalah bagian dari kebijakan penegakan hukum (law enforcement policy), dan bagian pula dari kebijakan perlindungan sosial. Kebijakan perlindungan sosial sendiri adalah bagian dari kebijakan sosial atau pembangunan nasional. Oleh karena itu berarti kebijakan kriminal juga bagian dari kebijakan sosial, yaitu usaha dari masyarakat atau negara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, ternyata bahwa dalam melaksanakan kebijakan kriminal tidak dapat dilepaskan dari kebijakan sosial, atau dengan kata lain kebijakan kriminal merupakan bagian integral dari kebijakan sosial. Hal ini dipertegas oleh Barda Nawawi Arief dengan mengatakan :

"Bertolak dari konsepsi kebijakan integrasi yang demikian itu, maka kebijakan penanggulangan kejahatan tidak banyak artinya apabila kebijakan sosial atau kebijakan pembangunan itu sendiri justru menimbulkan faktor-faktor kriminogen dan victomogen"²⁶⁾.

Penegasan seperti tersebut di atas menunjukkan bahwa untuk menanggulangi kejahatan maka, masalah strategis yang justru harus ditanggulangi ialah menangani masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan suburkan kejahatan. Ini

26). Barda Nawawi Arief, Op.cit, hal. 8.

berarti penanganan atau penggarapan masalah-masalah ini justru merupakan posisi kunci dan strategis dilihat dari sudut politik kriminal²⁷⁾. Oleh karena itu wajar apabila beberapa Kongres PBB The Prevention of Crime and the Treatment of Offender sangat memperhatikan masalah ini, antra lain Kongres PBB ke-7 tahun 1985 mengatakan :

"Proyek-proyek dan program-program pembangunan yang direncanakan dan dilaksanakan sesuai dengan kenyataan-kenyataan lokal, regional dan nasional, hendaknya didasarkan pada penelitian yang dapat diandalkan dan perkiraan/ramalan akan perkembangan atau kecenderungan sosial ekonomi pada saat ini maupun dimasa yang akan datang, termasuk kecenderungan kejahatan, dan juga hendaknya didasarkan pada studi/penelitian mengenai pengaruh dan akibat-akibat sosial dari keputusan-keputusan serta investasi-investasi kebijakan. Studi-studi kelayakan juga harus meliputi faktor-faktor sosial dan dilengkapi dengan penelitian mengenai kemungkinan timbulnya akibat-akibat kriminogen serta strategi alternatif untuk menghindarnya. *"Development projects and programmes that are to be planned and executed in conformity with local, reliaties assesment and forecast of present and future socio economic trends, including crime, and onstudies of the social impact and consequences of the policy decisions and investments. Feasibility studies, wich usually involve considerations of economic viability should also include social factor in be complemented by research on the possible criminogenic consquences of such projects, with alternative strategies for avoding them"*²⁸⁾.

Demikian perlunya memperhatikan berbagai aspek sosial dan dampak negatif dari pembangunan, maka

27). Ibid, hal. 10.

28). Barda Nawawi Arief, Op.cit. hal. 14.

kongres PBB ke 8 The Prevention of Crime and the Treatment of Offender mengidentifikasi faktor-faktor kondusif penyebab kejahatan yang lebih luas dan terperinci (khususnya dalam masalah "Urban Crime") antara lain :

- "a. Kemiskinan, pengangguran, kebutahurufan (kebodohan), ketiadaan/kekurangan perumahan yang layak dan sistem pendidikan serta sistem latihan yang tidak cocok/serasi.
- b. Meningkatnya jumlah penduduk yang tidak mempunyai prospek (harapan) karena proses integrasi sosial juga karena memburuknya ketimbangan-ketimbangan sosial.
- c. Mengendornya ikatan sosial dan keluarga
- d. Keadaan-keadaan/kondisi yang menyulitkan bagi orang-orang yang beremigrasi ke kota-kota atau ke negara-negara lain,
- e. Rusaknya atau hancurnya identitas budaya asli yang bersamaan dengan adanya resisme dan diskriminasi menyebabkan kerugian/kelemahan di bidang sosial, kesejahteraan dan dalam lingkungan pekerjaan.
- f. Menurunnya atau mundurnya (kualitas) lingkungan perkotaan yang mendorong peningkatan kejahatan dan berkurangnya (tidak cukupnya) pelayanan bagi tempat-tempat fasilitas lingkungan pekerjaan.
- g. Kesulitan-kesulitan bagi orang-orang dalam masyarakat modern untuk berintegrasi sebagaimana mestinya di dalam lingkungan masyarakat, di lingkungan keluarga/familinya, tempat pekerjaannya atau dilingkungan sekolahnya.
- h. Penyalahgunaan alkohol, obat bius dan lain-lain yang pemakaiannya juga diperluas karena faktor-faktor yang disebut di atas.
- i. Meluasnya aktivitas kejahatan yang terorganisasi, khususnya perdagangan obat bius dan penadahan barang curian.
- j. Dorongan-dorongan ide dan sikap (khususnya oleh media massa) yang mengarah pada tindakan kekerasan ketidak samaan (hak) atau sikap-sikap toleransi²⁹⁾.

29). Ibid. hal. 13.

Memperhatikan kondisi-kondisi sosial dan pembangunan dalam menanggulangi kejahatan dapat berarti masyarakat dengan seluruh potensinya harus juga dipandang sebagai bagian dari politik kriminal. Sehubungan dengan hal ini, Kongres PBB juga menekankan bahwa, "*community relation were the basis for crime prevention programmes*". Oleh karena itu dipandang perlu untuk membina dan meningkatkan efektivitas "extra legal system" atau "informal system" yang ada di masyarakat dalam usaha penanggulangan kejahatan, antara lain kerja sama dengan organisasi sosial dan keagamaan, lembaga pendidikan dan organisasi volunteer yang ada di masyarakat. Sehubungan dengan pemanfaatan extra legal system atau informal system, maka di dalam "Guiding Principles" yang dihasilkan Kongres PBB ke-7 juga diberikan pedoman mengenai "Traditional forms of social control" sebagai berikut : "*When new crime prevention measures are introduced, necessary precaution should be taken not to disrupt the smooth and effective functioning of traditional system, full attention being paid to the preservation of cultural identities and the protection of human right*"³⁰⁾.

30). Ibid, hal. 21.

B. Pengertian Dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Bisnis

1. Pengertian Tindak Pidana Bisnis

Di dalam beberapa kepustakaan para sarjana tidak memberikan batasan yang tegas antara tindak pidana bisnis dengan tindak pidana ekonomi dan korporasi, sehingga ketiganya sering diidentikkan satu sama lain. Seperti yang dikemukakan Adrianus Meliala bahwa, "Perbuatan bisnis menyimpang biasa diidentikkan sebagai kejahatan korporasi (corporate crime) yang termasuk di dalamnya amat luas dan beragam, mulai dari kejahatan perbankan, kejahatan jabatan, pembajakan merek dan hak cipta, pemalsuan produk, kejahatan keimigrasian hingga kejahatan dalam lalu lintas uang dapat dianggap termasuk dalam kategori ini³¹⁾. Begitu pula Daouglas Whitman dan John Willian Gergazo tidak memberi batasan pengertian antara white collar crime dengan businiss crime dengan mengatakan sebagai berikut :

"Kebanyakan orang menggunakan istilah ini untuk mengacu kepada aktivitas kriminal yang dilakukan tanpa kekuatan maupun kekerasan. Mereka yang melakukan white collar crime bermaksud untuk mengelabui masyarakat dengan cara melakukan kecurangan dan bukannya dengan cara-cara kekerasan. White collar crime sering dilakukan terhadap business atau dengan menggunakan business"³²⁾

31). Adrianus Meliala. *Menyingkap Kejahatan Krah Putih*. (Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1993), hal. 106.

32). Roeslan Saleh. *Perbutan Yang Meniurus Pada Tindak Pidana Perbankan*. (Makalah Seminar, Semarang, 11-12 Juni 1990), hal 13.

Berdasarkan kedua pendapat tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa baik kejahatan ekonomi, korporasi, white collar crime dan kejahatan bisnis mempunyai sifat yang sama yaitu sebagai kejahatan yang dilakukan karena motif ekonomi dan tanpa menggunakan kekerasan.

Menurut Barda Nawawi Arief³³⁾, bahwa "secara yuridis kejahatan ekonomi dapat dilihat secara sempit sebagai tindak pidana ekonomi (TPE) yang diatur di dalam UU-TPE (UU. No. 7 Drt 1955). Disamping itu, kejahatan ekonomi dapat juga dilihat secara luas, yaitu semua tindak pidana diluar UU-TPE yang bercorak atau bermotif ekonomi atau yang dapat mempunyai pengaruh negatif terhadap kegiatan perekonomian dan keuangan negara yang sehat. Kegiatan perekonomian dan keuangan dapat meliputi bidang yang sangat luas dan saling terkait, antara lain yang menonjol dalam bidang usaha perdagangan, industri dan perbankan".

Selanjutnya beliau mengatakan bahwa pengertian dan ruang lingkup kejahatan ekonomi dalam arti luas itulah yang di dalam istilah asing biasa disebut dengan berbagai istilah antara lain, *economic criem*, *crime as business*, *business crime*, *abuses of economic power* atau *economic abuses*. Dengan demikian kejahatan bisnis adalah bagian dari

33). Muladi dan Barda Nawawi Arief, Op.cit hal. 152-153.

kejahatan ekonomi, atau dengan kata lain kejahatan ekonomi lebih luas dari pada kejahatan bisnis. Mengenai hal ini dikemukakan oleh Sunaryati Hartono bahwa "Istilah dan pengertian *economic crime* lebih luas dari pada *business crime*"

Pengertian tindak pidana bisnis dikemukakan Muladi sebagai berikut ; "apabila kita menggunakan pendekatan teknis maka, kejahatan ekonomi lebih menampakkan dirinya sebagai kejahatan di lingkungan bisnis yakni bilamana pengetahuan khusus tentang bisnis diperlukan untuk menilai kasus yang terjadi. Dalam hal ini batasan yang dapat dikemukakan adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh orang dan atau badan hukum, tanpa menggunakan kekerasan, bersifat melawan hukum yang hakekatnya mengandung unsur penipuan memberikan gambaran salah, penggelapan, manipulasi, melanggar kepercayaan, akal-akalan atau pengelakan peraturan³⁴⁾.

Kongres ke-5 PBB mengenai The Prevention of crime and the treatment of Offender menyatakan, : Crime as business yaitu kejahatan yang bertujuan mendapat keuntungan material melalui kegiatan dalam bisnis atau industri, yang pada umumnya dilakukan secara terorganisir dan dilakukan oleh mereka yang mempunyai kedudukan terpandang dalam masyarakat.

34). Ibid. hal. 19.

Termasuk dalam kejahatan ini antara lain, yang berhubungan dengan pencemaran lingkungan, perlindungan konsumen dan dalam bidang perbankan, disamping kejahatan-kejahatan lainnya yang biasa dikenal dengan "*organized crime*", *white collar crime*" dan Korupsi"³⁵⁾.

Dari kedua pengertian kejahatan bisnis yang dikemukakan di atas, penulis lebih cenderung mengikuti pengertian yang dikemukakan oleh Prof Muladi karena :

- a. lebih menunjukkan ciri khas sebagai tindak pidana bisnis yaitu kejahatan yang dilakukan dalam lingkungan bisnis dan memerlukan pengetahuan khusus untuk menilai kasus-kasus yang terjadi.
- b. dilakukan oleh orang dan atau badan hukum tanpa kekerasan yang dapat berarti dilakukan dalam rangka bisnis yang legal yang membedakannya dengan kejahatan umum ataupun sindikat kriminal yang terkadang menganut penampilan bisnis legal bagi perusahaan-perusahaan yang seluruhnya bersifat kriminal.
- c. memberikan spesifikasi (perincian), jenis perbuatan yang dapat dilakukan dalam kejahatan bisnis.

35). Barda Nawawi Arief. Op.cit. hal. 15

2. Ruang Lingkup Tindak Pidana Bisnis

Berangkat dari pengertian bisnis sebagai "usaha dagang atau usaha komersial" maka tindak pidana bisnis di dalam pembahasan ini, berkisar pada usaha perdagangan untuk mendapatkan keuntungan (komersial). Berhubung perdagangan secara besar-besaran umumnya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan, maka sasarannya juga ditujukan pula pada tindak pidana bisnis yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan. Sedangkan tindak pidana bisnis dimaksud, terbatas pada perbuatan-perbuatan perusahaan yang merugikan masyarakat, perusahaan dan negara. Sunaryati Hartono menyebut bisnis seperti ini sebagai bisnis torts, dengan mengatakan, "Business torts (selanjutnya disingkat BT) adalah perbuatan melawan hukum di bidang bisnis, yaitu perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji dari para usahawan yang merupakan pelanggaran terhadap hak-hak perusahaan lain"³⁶⁾.

Selanjutnya Hoeber memberikan beberapa bentuk dari tindak pidana bisnis ini, antara lain :

- "a. Membuka usaha secara melawan hukum, misalnya membuka perusahaan semata-mata untuk tujuan mematikan usahawan lain yang menjadi musuhnya;
- b. Mencegah atau mengganggu terjadinya kontrak;

36). Ibid, hal. 155.

- c. Penghinaan atau pencemaran nama baik seseorang atau perusahaan lain (defamation) atau pencemaran mutu barang perusahaan lain (slander of quality atau trade libel);
- d. Praktek-praktek perdagangan yang curang/tidak jujur (unfair trade practices) antara lain :
 - pemasaran curang (fraudulent marketing);
 - pelanggaran merek dan nama dagang (Infringing trade mark or trade name);
 - pelanggaran patent atau hak cipta (infringing patent or copyright);
 - pelanggaran rahasia perdagangan (violating trade secrets)"³⁷⁾

Mengamati kategori perbuatan bisnis torts seperti diatas maka, dapat dikatakan bahwa ruang lingkup kejahatan bisnis disini adalah, meliputi kejahatan-kejahatan yang timbul pada waktu pendirian perusahaan, produk dan pemasaran.

Telah dikemukakan pada halaman terdahulu bahwa, tindak pidana bisnis adalah bagian dari tindak pidana ekonomi dalam arti luas, yang termasuk disini adalah pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dari peraturan-peraturan yang dibidang ekonomi, pelanggaran mana diancam dengan hukuman yang tidak termuat di dalam undang-undang nomor 7 Darurat 1955 (peraturan pidana khusus lainnya)"³⁸⁾. Selain itu, juga termasuk perbuatan-perbuatan pelanggaran hukum yang menyangkut bidang ekonomi, dapat diperlakukan beberapa ketentuan dalam KHUP, pelanggaran mana :

37). Loc.cit.

38). H.A.K Moch Anwar. Hukum Pidana di Bidang Ekonomi. (Bandung, PT. Ghalia Aditya Bakti, 1990), hal. 20.

- a. Mempergunakan daya upaya surat-surat berharga dan warkat-warkat perbankan;
- b. Berhubungan dengan perdagangan, produksi dan distribusi yang kesemuanya meberikan pengaruh terhadap situasi dan perkembangan ekonomi og moneter³⁹⁾.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka, tindak pidana bisnis meliputi :

- a. Tindak pidana di bidang ekonomi berdasarkan ketentuan-ketentuan pidana dalam peraturan-peraturan khusus di bidang ekonomi. Dalam kelompok ini termasuk peraturan-peraturan di bidang ekonomi yang memuat ketentuan-ketentuan pidana di luar ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Darurat Tahun 1955 Pasal 1 sub 1e. Meskipun pelanggaran ketentuan-ketentuannya tidak dinyatakan sebagai tindak pidana ekonomi, tetapi menurut sifat dan bidangnya peraturan ini diliputi oleh hukum pidana ekonomi.
- b. Tindak pidana di bidang ekonomi yang dapat diberlakukan ketentuan pidana dalam KUHP, dimana beberapa jenis tindak pidana tersebut mempunyai pengaruh yang luas terhadap perekonomian negara dan masyarakat, seperti perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan produksi dan distribusi bahan-bahan pokok dalam pengawasan dan mengurangi

39). Loc.cit.

kelancaran ekspor serta penggunaan prasarananya, seperti perbankan.

C. Dimensi Perkembangan Tindak Pidana Bisnis

Pemerintah dalam melaksanakan pembangunan, memberikan prioritas utama pada bidang ekonomi, sehingga menyebabkan maraknya peningkatan di berbagai bidang usaha.

Menurut I.S. Susanto bahwa, "Di Indonesia perkembangan yang luar biasa ini, disamping karena peranan pemerintah melalui peraturan yang memberikan kemudahan berusaha dan fasilitas lainnya, juga karena sifat korporasi (perusahaan) yang cenderung ekspansif. Usaha mendorong pertumbuhan dan perkembangan korporasi ini adalah sejalan dengan tuntutan dalam memenuhi tahapan-tahapan pembangunan yakni dengan meletakkan dasar-dasar pembangunan industri dalam menyongsong era pembangunan jangka panjang Kedua, disamping pengaruh globalisasi pada beberapa tahun belakangan"⁴⁰⁾

Tidak dapat dihindari bahwa dengan berkembangnya dunia usaha, berkembang pula keinginan-keinginan sementara orang untuk mempergunakan kesempatan memperoleh keuntungan sebesar mungkin, tanpa menghiraukan apakah perbuatannya itu akan merugikan orang lain atau tidak. Baginya setiap usaha haruslah dititik beratkan pada bagaimana mencari keuntungan

40). I.S. Suanto, *Kejahatan Korporasi*, (Semarang, Universitas Diponegoro, 1995), hal. 1.

yang sebesar-besarnya. Menurut Loebby Logman sifat yang demikian yang mengarah keterjadinya tindakan yang dianggap kurang etis dalam norma dunia usaha, bahkan mungkin sampai ke arah terjadinya kriminal⁴¹⁾

Salah satu sifat yang menonjol dari "wajah" kejahatan pada masyarakat pasca industri pada akhir abad ke-20 menurut Satjipto Rahardjo adalah membaurnya dunia kriminal dengan dunia sipil, masyarakat biasa atau menyelinap ke dalam kehidupan normal dan sah. Dengan demikian berbeda dari keadaannya dahulu, penjahat tidak merupakan kelompok sendiri yang terpisah secara tajam dari kehidupan sipil, melainkan antara keduanya terjalin semacam interdependensi. Kejadian yang amat penting dalam perkembangan kriminalitas dewasa ini, setidaknya-tidaknya yang sudah berlangsung di negara-negara pasca industri, adalah penetrasi dan penyamaran (cover up) yang dilakukan oleh kelompok-kelompok kejahatan terhadap dunia sipil. Penyamaran dilakukan sedemikian rupa sehingga masyarakat tidak menduga bahwa suatu organisasi atau korporasi yang beroperasi dalam masyarakat secara sah dan baik-baik itu adalah topeng yang menyembunyikan wajah kejahatannya⁴²⁾.

41). H. Loebby Logman, Aspek Hukum Pidana Tentang Perlindungan Konsumsi, (Makalah Pada Seminar Kriminologi K VII di Semarang 1-2 Desember 1994), hal. 1.

42). Satjipto Rahardjo, ~~Penjahat-Penjahat~~ Abad Ke-20, (Suara Pembaharuan, 29-6-1991).

Pernyataan seperti tersebut di atas, menunjukkan bahwa meskipun tindak pidana bisnis sudah berkembang tetapi belum banyak dikenal oleh masyarakat, dibanding dengan tindak pidana lain seperti pembunuhan, pencurian, perampokan, sehingga seringkali masyarakat ditipu oleh suatu perusahaan akan tetapi masyarakat tidak merasa dirugikan, dan walaupun merasa dirugikan sering mereka tidak mampu berbuat. "Hal ini disebabkan masyarakat sebagai konsumen, karena sifatnya yang tidak terorganisir dan karena adanya berbagai keterbatasan sehingga kedudukannya sangat lemah bila berhadapan dengan pengusaha. Kondisi yang demikian itu, menyebabkan masyarakat menjadi sasaran yang sangat empuk bagi terjadinya kejahatan korporasi, terlebih lagi bila tidak ada atau kurangnya peraturan perundang-undangan yang melindungi kepentingan konsumen seperti peraturan tentang produksi yang tidak berbahaya, kualitas produk, struktur harga.⁴³⁾

Ternyata dalam perkembangan perusahaan di Indonesia membawa pula perkembangan kejahatan bisnis dengan berbagai macam modus operandi, sebagai contoh yang dikemukakan oleh Loebby Logman bahwa, "suatu perusahaan dengan menerbitkan prospektus untuk "go publik". Dikatakan bahwa hasil pengumpulan dana akan dipakai membayar hutang, sehingga perusahaan tersebut tidak perlu lagi membayar bunga dan keuntungan akan

43). I.S. Susanto, Op.cit, hal. 40.

dapat dibagikan kepada para pemegang saham. Ternyata bahwa setelah dana terkumpul, tidak dipakai untuk membayar hutang perusahaan seperti yang termuat dalam prospektus, akan tetapi dipakai untuk investasi perusahaan, umpamakan saja untuk memperluas pabrik. Memang dalam hal perusahaan mengalami keuntungan, masalah pengalihan penggunaan dana mungkin tidak menjadi masalah. Akan tetapi bagaimana seandainya perusahaan tersebut mengalami kerugian⁴⁴⁾.

Belum pernah terjadi dalam sejarah perkembangan kejahatan bisnis seperti yang terjadi dewasa ini, hampir semua peluang digunakan oleh pengusaha untuk mendapatkan keuntungan, sekalipun peluang itu melawan hukum. Secara spesifik adalah usaha periklanan untuk memperkenalkan dan menarik minat konsumen melalui berbagai media, mulai dari cara mempromosikan melalui salesman sampai pada cara menggunakan media radio dan audiovisual, kebanyakan melanggar peraturan dan etika bisnis.

Mengenai hal tersebut di atas Loebby Logman kembali memberi contoh sebagai berikut :

"Umpamakan saja ada sebuah perusahaan memasang iklan dengan memberikan hadiah kepada seribu pengirim pertama bagian dari kemasan produksinya. Siapakah yang dapat mengawasi peristiwa tersebut. Ataupun memang perbuatan demikian dianggap sebagai mainan saja dalam suatu promosi. Memang dalam hal peristiwa demikian dapat saja dikatakan bahwa pada pengirim tidak memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan⁴⁵⁾.

44). Loebby Logman, Op.cit, hal. 12.

45). Ibid, hal. 11.

Dalam contoh yang dikemukakan di atas, perusahaan itu telah sengaja berbuat sesuatu yang tidak benar (menipu) dengan tujuan agar sebanyak mungkin orang membeli hasil produksinya dengan imbalan hadiah yang mungkin saja hadiah itu tidak ada sama sekali.

Cukup banyak perbuatan yang termasuk kejahatan bisnis yang berkembang sebagai akibat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebagaimana kita ketahui bahwa, teknologi sangat luas mempengaruhi sistem produksi dan sistem pemasaran dalam dunia bisnis. Hal ini dikemukakan oleh Alvin Toffeler bahwa :

"Dalam menufaktur massal yang tradisional, pabrik mengalirkan arus barang yang identik, jutaan sekaligus. Dalam sektor gelombang ketiga (perkembangan terakhir) produksi massal digantikan oleh lawannya, yaitu produksi de-massifikasi renteng produksi yang pendek bahkan yang menurut pesanan, diproduksi satu demi satu didasarkan pada program komputer dan pengendalian numerik"⁴⁶⁾.

Selanjutnya Alvin Toffeler mengatakan bahwa "Kecenderungan yang sama nampak pula dalam sistem distribusi, dimana makin terlihat banyak segmentasi pasaran, sasaran direct mail, toko barang khusus, dan bahkan sistem pengantaran ke rumah yang didasarkan pada komputer rumah tangga dan berbelanja lewat televisi"⁴⁷⁾.

46). Alvin Toffeler, *Kedutan dan Gelombang* (Terjemahan), (Jakarta, PT. Panca Simpati, 1987), hal. 27.

47). Ibid, hal. 28.

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, hendak dikatakan bahwa dengan penggunaan teknologi dalam kehidupan bisnis secara luas, akan mempengaruhi dimensi perkembangan kejahatan bisnis.

Tindak pidana bisnis sebagai bagian dari tindak pidana ekonomi, tidak hanya merupakan masalah bagi masyarakat negara tertentu (nasional), tetapi juga menjadi masalah yang dihadapi oleh seluruh masyarakat di dunia. Dengan demikian tindak pidana bisnis sudah menjadi fenomena internasional. Sebagaimana di katakan oleh T. Mulya Lubis bahwa "Kejahatan ekonomi (bisnismen) bukan lagi merupakan kejahatan lintas nasional, tetapi sudah merupakan kejahatan transnasional". Hal ini terbukti pada tahun 1989 di Milan Italia, sejumlah petugas pengadilan dan pengacara setempat menyerbu ke dalam kantor pusat Montedison, sebuah perusahaan kimia raksasa. Setelah dilakukan penggeledahan para penyidik mengindentifikasi sejumlah software yang tidak berlisensi senilai 55 ribu dollar, kebanyakan berupa copy dari lotus 123, program spreadsheet paling populer dewasa ini karya lotus Inc"⁴⁸⁾.

Pencurian karya inteltual, baik yang berupa pemikiran dan penemuan yang dilidungi oleh hak cipta, patent dan merek kini telah menjadi masalah besar bagi banyak industri diseluruh dunia. Hal ini bukan hanya

48). Adrionus Meliala, Op.cit, hal. 11.

dilakukan oleh Milan Italia, tetapi Indonesia, Thailand dan Cina tidak luput dari tindak pidana bisnis yang berdimensi International itu. Mulai dari perangkat komputer, industri hiburan sampai pada industri obat-obatan (farmasi).

Dimensi perkembangan kejahatan bisnis seperti itu, telah lama menjadi perhatian dunia International. hal ini terlihat sejak kongres PBB ke-5 Tahun 1975 di Jenewa yang memasukkan tindak pidana bisnis sebagai salah satu kecenderungan/perkembangan kejahatan (crime) yang perlu diperhatikan. Dalam laporan Kongres PBB ke-5 tersebut terungkap :

"Crime as business" yaitu kejahatan yang bertujuan mendapat keuntungan material melalui kegiatan dalam bisnis atau industri, yang pada umumnya dilakukan secara terorganisir dan dilakukan oleh mereka yang mempunyai kedudukan terpandang dalam masyarakat, termasuk dalam kejahatan ini antara lain yang berhubungan dengan pencemaran lingkungan, perlindungan konsumen dan dalam bidang perbankan, disamping kejahatan lainnya yang biasa dikenal dengan "organized crime", "White collar crime" dan korupsi."49)

Selanjutnya Kongres ke-6 PBB di Caracas masih membicarakan juga masalah kejahatan ekonomi dengan menegaskan bahwa "kejahatan-kejahatan yang sangat membahayakan dan merugikan tidaklah hanya kejahatan-kejahatan terhadap nyawa orang lain dan harta benda, tetapi juga menyalahgunakan kekuasaan (abuse of power). Ditegaskan pula bahwa White collar crime dan

49). Bardi Nawawi Arief, Op.cit, hal. 15.

economic crime cenderung menjadi terorganisir dan bersifat transnasional"50).

Begitu juga Kongres ke-7 PBB tahun 1985 masih meminta perhatian terhadap kejahatan-kejahatan tertentu yang dipandang membahayakan sehubungan dengan peranan dari pertumbuhan industri serta kemajuan ilmu dan teknologi, seperti pelanggaran terhadap ketentuan/persyaratan barang dan jasa bagi para konsumen (Offences againts the provision of good and services to consumers)⁵¹).

50). Ibid, hal. 6.

51). Loc.cit.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Kebijakan Legislatif Dalam Menetapkan dan Merumuskan Perbuatan dan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Bisnis

Dalam sejarah perekonomian, kehidupan ekonomi masyarakat dahulu belum dicampuri oleh negara (pemerintah), ketika itu setiap orang dapat dengan bebas mengurus perekonomiannya sendiri termasuk kebebasan melakukan kegiatan bisnis.

Bertambah banyaknya kebutuhan manusia, menyebabkan bertambah luas pula urusan di bidang bisnis yang pada akhirnya menimbulkan krisis-krisis di bidang ekonomi. Maka keterlibatan negara untuk mengatur kegiatan dalam bidang bisnis ini dirasakan semakin perlu untuk melindungi kepentingan-kepentingan yang dirugikan.

Di Indonesia, peraturan-peraturan yang mengatur mengenai tindak pidana bisnis, terdapat dalam dua bentuk peraturan perundang-undangan yaitu : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Peraturan Perundang-undangan yang ada di luar KHUP dan UU-TPE.

1. Tindak Pidana Bisnis Dalam KUHP

Sebagaimana kita ketahui bahwa, KUHP yang berlaku sekarang ini adalah berasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Untuk Hindia Belanda,

diumumkan dengan stb. 1915. No. 732, kemudian dengan firman Raja tanggal 4 Mei 1917 No. 46 (stb. No. 497), ditetapkan verordening untuk mengatur berlakunya Kitab Hukum Pidana yang baru. Kitab Hukum Pidana inilah yang sampai kini masih berlaku¹⁾.

Sejak saat itu, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah mengatur mengenai tindak pidana yang berhubungan dengan bisnis. Hal ini berarti, sejak dahulu tindak pidana bisnis sudah menjadi masalah dalam kehidupan ekonomi masyarakat, meskipun perkembangannya tidak sepesat sekarang ini.

Walaupun KUHP yang berlaku sekarang ini berasal dari KUHP Hindia Belanda, tetapi tentu saja hukum pidana buatan Pemerintah Hindia Belanda tidak begitu saja diterima sebagai hukum pidana kita sendiri, melainkan dilakukan perubahan-perubahan oleh berbagai undang-undang :

- a. Undang-Undang No. 1 Tahun 1946, yaitu perubahan mengenai nama WvSvNI menjadi WvS (KUHP), perubahan redaksi beberapa pasal dan penghapusan beberapa pasal dalam KUHP.
- b. Undang-Undang No. 1 Tahun 1960, yaitu perubahan mengenai ancaman pidana terhadap delik-delik

1). R. Tresna, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Bandung, Universitas Pajajaran, 1959), hal. 205

culpa di dalam Pasal 188, Pasal 359 dan Pasal 360 KUHP menjadi penjara selama-lamanya lima tahun atau kurungan selama-lamanya satu tahun.

- c. Undang-undang No. 16/Perpu/1960, merubah kata-kata "Vijf en twintig gulden" (dua puluh lima rupiah) dalam Pasal 364, Pasal 373, Pasal 379, Pasal 384 dan Pasal 407 ayat (1) KUHP menjadi dua raus lima puluh rupiah.
- d. Undang-Undang No. 18/Perpu/1960, merubah ancaman pidana denda terhadap semua tindak pidana dalam KUHP dan ketentuan pidana lain yang dikeluarkan sebelum tanggal 17 Agustus 1945, yaitu dengan melipat gandakan lima belas kali setiap jumlah ancaman dan dibaca dalam mata uang rupiah.
- e. Undang-Undang No. 1/PNPS/1965 Tentang Pencegahan dan Penyalahgunaan dan Penodaan Agama, yaitu dengan memasukan Pasal 156 a ke dalam KUHP yang berbunyi sebagai berikut. "Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun, barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan :
 1. yang pada pokoknya bersifat bermusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia
 2. dengan maksud agar orang tidak menganut agama apapun juga yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.

f. Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian yaitu melakukan perubahan-perubahan sebagai berikut :

1. merubah ancaman-ancaman pidana yang terdapat :

a. dalam Pasal 303 ayat (1) KUHP menjadi pidana penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah.

b. dalam Pasal 542 ayat (1) KUHP menjadi pidana penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh juta rupiah.

c. dalam Pasal 542 ayat (3) KUHP menjadi pidana penjara selama-lamanya enam tahun atau denda sebanyak-banyaknya lima belas juta rupiah.

2. merubah sebutan Pasal 452 KUHP menjadi Pasal 303 atau dari pelanggaran menjadi kejahatan.

g. Undang-Undang No. 4 Tentang Perubahan dan Penambahan beberapa pasal dalam KUHP bertalian dengan perluasan berlakunya ketentuan perundang-undangan pidana, kejahatan penerbangan dan kejahatan terhadap sarana/prasarana penerbangan.

Perubahan dan penambahan tersebut adalah :

1. merubah dan menambah Pasal 3 dan Pasal 4 angka 4 Bab I Buku I KUHP

2. menambah 3 pasal baru dalam Bab IX Buku I KUHP yaitu Pasal 95a, 95b dan 95c.
3. menambah bab baru setelah Bab XXIX KUHP dengan Bab XXIX A tentang kejahatan penerbangan yang terdiri dari Pasal 479 huruf a sampai dengan Pasal 479 r (18 pasal).

Ternyata bahwa, setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, KUHP telah mengalami perubahan sebanyak tujuh kali dan ternyata perubahan, penambahan dan penghapusan itu tidak ada yang menyangkut tindak pidana bisnis, kecuali Pasal 383 yang dirubah ancaman pidana dendanya melalui Pasal 384 oleh Undang-Undang No. 16/Perpu/1960. Begitu pula perubahan ancaman pidana denda oleh Undang-Undang No. 18/Perpu/1960 terhadap semua tindak pidana yang terdapat dalam KUHP dan ketentuan pidana lain yang dikeluarkan sebelum tanggal 17 Agustus 1945. Dengan demikian dapat dikatakan, kebijakan perumusan perbuatan pidana yang berhubungan dengan tindak pidana bisnis sejak awal berlakunya KUHP (1 Januari 1918), sama dengan kebijakan hukum pidana yang berlaku sekarang ini.

Bagaimana pengaturan tindak pidana bisnis dalam KUHP ? Mengenai hal ini dapat dilihat dalam rumusan perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam KUHP sebagai berikut :

1. Memalsu surat, memakai surat palsu (Pasal 264 KUHP), antara lain terhadap; akta otentik, surat hutang, surat sero, talon, tanda bukti deviden, surat kredit, surat dagang.
2. Menyuruh memasukkan keterangan palsu dalam suatu akta otentik atau memakai akta tersebut (Pasal 266 KUHP).
3. Menaruh nama/tanda secara palsu di atas atau di dalam suatu hasil karya sastra, keilmuan, kesenian, kerajinan, (Pasal 380 ke-1) dan sengaja menjual, menyerahkan, mempunyai persediaan untuk dijual atau dimasukkan ke Indonesia hasil karya yang dipalsukan (Pasal 380 ke-2 KUHP).
4. Mendapatkan, melangsungkan atau memperluas debit perdagangan secara curang (Pasal 382 bis KUHP).
5. Menyerahkan barang lain (baik mengenai jenis, keadaan dan banyaknya dengan cara tipu muslihat (Pasal 383 KUHP).
6. Menjual, menawarkan atau menyerahkan barang palsu yang berkurang nilainya atau faedahnya (Pasal 386 KUHP).
7. Membangun, menyerahkan bahan bangunan dengan cara curang (Pasal 387 KUHP).
8. Menyiarkan kabar bohong yang menyebabkan harga barang dagangan, dana-dana atau surat-surat berharga menjadi turun atau naik (Pasal 390 KUHP).

9. Memasukkan atau mengeluarkan dari Indonesia, menjual, menawarkan, menyerahkan, membagikan, mempunyai persediaan untuk dijual barang atau pada bungkusnya dipakai/ditirukan nama, firma atau merek hak orang lain (Pasal 393 KUHP).

Berdasarkan uraian pasal-pasal tersebut di atas, terlihat bahwa pengaturan tindak pidana bisnis dalam KUHP terpecah dalam tiga bentuk kegiatan bisnis, yaitu :

- a. Kejahatan bisnis dalam bidang pendirian perusahaan yang diatur dalam Pasal 264 ayat (1), 266 ayat (1), dan 382 bis KUHP.
- b. Kejahatan bisnis dalam bidang produksi, dapat dilihat dalam Pasal 380 dan Pasal 387 KUHP.
- c. Kejahatan bisnis dalam bidang pemasaran yaitu diatur dalam Pasal 264 ayat (2), 266 ayat (2), 380 ke-2, 382 bis, 386, 387, 390 dan Pasal 393 KUHP.

Dari tiga bentuk tindak pidana bisnis tersebut di atas terlihat bahwa tindak pidana bisnis yang paling banyak diatur dalam KUHP adalah tindak pidana bisnis dalam bidang pemasaran, karena hampir semua pasal yang mengatur tindak pidana bisnis dalam bidang pendirian perusahaan atau bidang produksi, juga mengatur tindak pidana bisnis dalam pemasaran. Sebaliknya banyak pasal-pasal yang hanya mengatur tindak pidana bisnis dalam bidang pemasaran. Hal ini dapat berarti bahwa tindak

pidana bisnis yang paling banyak hendak ditanggulangi dengan menggunakan hukum pidana dalam KUHP adalah tindak pidana bisnis dalam bidang pemasaran.

KUHP sebagai kebijakan hukum pidana pada tahap formulasi, pertama-tama adalah menentukan jenis perbuatan apa yang dapat dimasukkan sebagai perbuatan pidana bisnis, kemudian menentukan sanksi apa yang akan dijatuhkan. Sehubungan dengan itu, dari rumusan pasal-pasal tersebut di atas dapat diidentifikasi perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana bisnis menurut KUHP yaitu :

ad a. Tindak Pidana bisnis dalam bidang pendirian perusahaan dapat dilakukan dalam bentuk perbuatan :

1. memalsukan atau menyuruh orang lain memasukkan keterangan palsu dalam suatu akta otentik pendirian perusahaan
2. mendirikan atau mengembangkan perusahaan dengan maksud mematikan perusahaan lain
3. menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan akta palsu dalam pendirian perusahaan.

ad b. Tindak pidana bisnis dalam bidang produksi, dapat dilakukan dalam bentuk perbuatan :

1. membuat bangunan dengan cara melakukan suatu perbuatan curang.

2. menaruh nama atau merek palsu pada suatu barang produksi perusahaan lain.

ad c. Tindak pidana bisnis dalam bidang pemasaran, dapat dilakukan dalam bentuk :

1. menjual barang kepada pembeli yang tidak sesuai dengan keinginan pembeli baik mengenai jenis, keadaan dan jumlahnya
2. menjual barang palsu
3. menjual barang yang membahayakan keselamatan orang atau negara
4. menyiarkan kabar bohong agar harga barang dagangannya turun atau naik.

Melihat perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai kejahatan bisnis, maka dapat dikatakan bahwa perbuatan-perbuatan itu benar-benar perbuatan yang tidak dikehendaki karena perbuatan itu dapat menimbulkan kerugian material dan spiritual bagi warga masyarakat. Selain itu, perbuatan tersebut dapat menghambat atau menghalangi cita-cita bangsa yang sedang membangun perekonomian sehingga merupakan bahaya bagi masyarakat.

Kebijakan hukum pidana sebagai bagian dari kebijakan kriminal dan sekaligus menjadi bagian kebijakan sosial, bertujuan untuk memberi perlindungan kepada masyarakat agar dapat mencapai kesejahteraan. Dalam hubungan ini, secara konseptual KUHP telah memberikan perlindungan kepada tiga kelompok kepentingan yaitu, kepentingan

masyarakat (konsumen), kepentingan pengusaha dan kepentingan negara. Dengan demikian kebijakan merumuskan perbuatan pidana bisnis dalam KUHP, selain untuk menertibkan perkembangan bisnis juga sekaligus untuk memberi perlindungan kepada semua lapisan masyarakat dari kerugian atau bahaya-bahaya yang dapat ditimbulkan oleh tindak pidana bisnis yang dilakukan oleh perusahaan.

Mengenai sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana bisnis, dapat pula dilihat dalam rumusan pasal-pasal yang mengatur tentang tindak pidana bisnis tersebut.

Ditinjau dari segi jenis sanksi pidana yang akan dikenakan kepada pelaku tindak pidana bisnis, KUHP hanya menetapkan dua jenis sanksi pidana, yaitu dapat dilihat dalam Tabel I berikut ini.

Tabel : I. Jenis-jenis Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Bisnis Dalam KUHP

| Pasal yang Mengatur Tindak Pidana Bisnis Dalam KUHP | Jenis Sanksi Pidana yang Ditetapkan | | Dirumuskan |
|---|-------------------------------------|-------|------------|
| | Penjara | Denda | |
| Pasal 264 | + | - | Tunggal |
| Pasal 266 | + | - | Tunggal |
| Pasal 380 | + | + | Alternatif |
| Pasal 382 bis | + | + | Alternatif |
| Pasal 383 | + | - | Tunggal |
| Pasal 386 | + | - | Tunggal |
| Pasal 387 | + | - | Tunggal |
| Pasal 390 | + | - | Tunggal |
| Pasal 393 | + | + | Alternatif |

Tabel di atas menunjukkan bahwa, hanya ada dua jenis sanksi pidana yang diancamkan terhadap tindak

pidana bisnis dalam KUHP yaitu, pidana penjara dan pidana denda. Diantara kedua jenis sanksi pidana tersebut yang paling banyak ditetapkan adalah pidana penjara, dimana semua tindak pidana bisnis yang di atur dalam KUHP diancam dengan pidana penjara, sedangkan yang diancam dengan pidana denda hanya sebagian kecil saja. Dengan demikian pembuat undang-undang lebih cenderung menggunakan pidana penjara untuk menanggulangi tindak pidana bisnis dibanding dengan sanksi pidana lain.

Walaupun demikian, tidak ditemukan alasan mengapa sanksi pidana penjara lebih banyak digunakan dari pidana lain. Hal ini dikemukakan pula oleh Barda Nawawi Arief bahwa " Dalam perundang-undangan selama ini tidak pernah dipersoalkan mengapa kejahatan itu perlu ditanggulangi dengan menggunakan sanksi hukum pidana"²⁾. Oleh karena itu penggunaan sanksi pidana penjara yang lebih banyak terhadap tindak pidana bisnis dalam KUHP sebagai salah satu sarana politik kriminal selama ini, dianggap sebagai hal yang wajar.

Perumusan sanksi pidana terhadap tindak pidana bisnis dalam KUHP, terdiri dari dua macam perumusan saja yaitu, perumusan tunggal dan perumusan

2). Barda Nawawi Aried, Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara, (Semarang, CV. Ananta, 1994), hal. 75-76.

alternatif. Dari sembilan tindak pidana bisnis yang disajikan dalam tabel I, terlihat bahwa kebanyakan delik (ada 6) menggunakan perumusan tunggal (penjara saja) dan hanya sebahagian kecil delik (ada 3) yang menggunakan perumusan alternatif (penjara atau denda). Sementara sanksi pidana yang dirumuskan secara kumulatif dan kumulatif-alternatif tidak ada sama sekali.

Berdasarkan uraian di atas, maka ternyata bahwa kebijakan merumuskan sanksi pidana terhadap kejahatan bisnis di dalam KUHP yang menonjol adalah perumusan pidana penjara secara tunggal. Hal ini dapat dimengerti mengingat pada waktu KUHP dibuat sangat dipengaruhi oleh aliran klasik yang berkembang pada abad ke-18. Pengaruh seperti itu dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief bahwa "Sistem perumusan tunggal merupakan peninggalan atau pengaruh yang sangat menyolok dari aliran klasik yang ingin mengobjektifkan hukum pidana, dan oleh karena itu sangat membatasi kebebasan hakim dalam memilih dan menetapkan pidana"3).

Apabila rumusan sanksi pidana tersebut di atas ditelusuri lebih jauh maka terungkap bahwa perumusan sanksi pidana penjara secara tunggal

3). Barda Nawawi Arief, *Bungarampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1996), hal. 156

umumnya ditujukan pada tindak pidana bisnis yang membahayakan kepentingan yang lebih luas yaitu kepentingan masyarakat (konsumen), kepentingan pengusaha dan kepentingan negara. Sedangkan sanksi pidana penjara yang dirumuskan secara alternatif dengan pidana denda, nampaknya ditujukan pada tindak pidana bisnis yang membahayakan kepentingan pengusaha tertentu (korban persaingan curang). Hal ini terbukti bahwa sanksi pidana tersebut berada pada pasal-pasal yang mengatur mengenai tindak pidana perbuatan curang (bedrog).

Mengenai bobot sanksi pidana yang diancamkan terhadap pidana bisnis yang terdapat dalam KUHP, dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel : II. Bobot Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Bisnis Dalam KUHP

| Pasal yang Mengatur Tindak Pidana Bisnis Dalam KUHP | Bobot Sanksi Pidana | |
|---|-------------------------|-----------------------|
| | Penjara | Denda |
| Pasal 264 | delapan tahun | - |
| Pasal 266 | tujuh tahun | - |
| Pasal 380 | dua tahun | lima ribu rupiah |
| Pasal 382 bis | delapan bulan | sembilan ratus rupiah |
| Pasal 383 | satu tahun empat bulan | - |
| Pasal 386 | satu tahun empat bulan | - |
| Pasal 387 | empat tahun | - |
| Pasal 390 | tujuh tahun | - |
| Pasal 393 | dua tahun delapan bulan | - |
| | empat bulan dua minggu | enam ratus rupiah |

Tabel II di atas memperlihatkan bahwa sanksi pidana penjara yang paling rendah adalah empat bulan dua minggu dan yang paling tinggi adalah delapan tahun. Sedangkan sanksi pidana denda yang paling ringan adalah sebanyak enam ratus rupiah dan yang paling berat adalah lima ribu rupiah.

Di dalam KUHP ataupun penjelasannya tidak ditemukan alasan mengapa tindak pidana bisnis diancam pidana yang berbeda, sehingga adanya tindak bisnis yang diancam pidana lebih ringan, sedangkan yang lain lebih berat dalam praktek diterima begitu saja.

Dilihat dari ancaman pidana terhadap tindak pidana bisnis KUHP, maka bobot delik dapat dibagi atas lima tingkatan yaitu dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel : III. Kategori Tindak Pidana Bisnis Menurut Lama/Beratnya Sanksi Pidana

| Bobot Tindak Pidana Bisnis | Lamanya/Beratnya Sanksi Pidana | |
|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| | Penjara | Denda |
| Sangat ringan | 4 bulan 2 minggu | enam ratus rupiah |
| Ringan | 1 tahun s/d 2 tahun | sembilan ratus rupiah |
| Sedang | 2 tahun s/d 4 tahun | lima ribu rupiah |
| Berat | 4 tahun s/d 7 tahun | - |
| Sangat berat/ serius | di atas 7 tahun | - |

Dari kelima kategorisasi tindak pidana bisnis di atas terlihat, bahwa tindak pidana bisnis yang

tergolong sangat ringan hanya diancam pidana penjara empat bulan dua minggu atau denda enam ratus rupiah. Tindak pidana bisnis yang tergolong ringan diancam pidana penjara satu tahun sampai dengan dua tahun, atau denda sembilan ratus rupiah. Tindak pidana bisnis yang bobotnya tergolong sedang, diancam pidana penjara dua tahun sampai dengan empat tahun atau denda lima ribu rupiah. Tindak pidana bisnis yang tergolong berat, diancam pidana penjara tunggal empat tahun sampai dengan tujuh tahun. Sedangkan tindak pidana bisnis yang tergolong sangat berat/serius diancam pidana penjara secara tunggal di atas tujuh tahun.

Terlihat bahwa tindak pidana bisnis yang diancam pidana penjara dengan alternatif pidana denda, hanyalah tindak pidana bisnis yang tergolong sangat ringan, ringan dan sedang. Hal mana dapat berarti bahwa kebebasan hakim untuk memilih sanksi pidana yang terbaik untuk dikenakan kepada sipelaku tindak pidana hanyalah apabila tindak pidana bisnis yang dilakukan itu tergolong sangat ringan, ringan dan sedang. Sedangkan pada tindak pidana bisnis yang tergolong berat atau sangat berat/serius, hakim tidak memiliki kebebasan untuk melakukan individualisasi pidana yang berorientasi pada orang, karena tindak pidana bisnis tersebut diancam pidana penjara tunggal yang bersifat absolut dan kaku.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, ternyata bahwa KUHP mengatur tindak pidana bisnis yang cukup luas karena mencakup semua kegiatan dalam dunia bisnis seperti, kegiatan dalam pendirian perusahaan, bidang produksi dan dalam bidang pemasaran. Tetapi harus diakui bahwa masih ada tindak pidana bisnis yang tidak diatur dalam KUHP, berhubung perkembangan kegiatan bisnis selama ini cukup pesat sebagai akibat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Begitu pula kepentingan yang dilindungi cukup luas, meliputi kepentingan masyarakat (konsumen), pengusaha dan kepentingan negara. Namun demikian KUHP belum dapat mewujudkan perlindungan kepentingan tersebut, karena lebih banyak menggunakan pidana penjara (perampasan kemerdekaan) daripada jenis pidana lainnya. Begitu pula perumusannya, lebih banyak yang dirumuskan secara tunggal daripada secara alternatif yang dianggap tidak sesuai dengan sifat dan motif dilakukannya tindak pidana bisnis yaitu berorientasi kepada masalah harta benda (ekonomi).

2. Tindak Pidana Bisnis Dalam Undang-Undang di Luar KUHP dan UU-TPE

Tindak pidana bisnis yang di atur dalam undang-undang di luar KUHP dan UU-TPE, bisa disebut tindak pidana bisnis dalam arti luas karena terdapat di dalam berbagai undang-undang yang mengatur mengenai bisnis.

Untuk mengetahui bagaimana pengaturan tindak pidana bisnis di dalam undang-undang di luar KUHP dan UU-TPE, dapat dibaca dari perumusan pasal-pasal yang mengatur ketentuan pidana dalam undang-undang yang bersangkutan, antara lain sebagai berikut :

a. Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan

Perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam undang-undang ini, termasuk tindak pidana bisnis yaitu :

1. Tidak memenuhi kewajiban mendaftarkan perusahaan (Pasal 32 ayat (1)).
2. Melakukan atau menyuruh melakukan pendaftaran secara keliru (Pasal 33 ayat (1)).
3. Tidak memenuhi kewajiban untuk menghadap atau menolak untuk menyerahkan, mengajukan persyaratan untuk pendaftaran (Pasal 34 ayat (1)).

Kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana bisnis dalam undang-undang ini, menetapkan bahwa suatu badan hukum dapat melakukan perbuatan pidana bisnis. Hal ini dapat dibaca dalam Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut :

"(1). Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal 32, 33 dan 34 undang-undang ini dilakukan oleh suatu badan hukum, penuntutan-penuntutan pidana dikenakan dan pidana dijatuhkan terhadap pengurus atau pemegang kuasa dan badan hukum

- (2). Ketentuan ayat (1) pasal ini diperlakukan sama terhadap badan hukum yang bertindak sebagai atau pemegang kuasa dari suatu badan hukum lain⁴⁾

b. Undang-Undang No. 4 Tahun 1982 Tentang Lingkungan Hidup

Perbuatan yang diatur dalam undang-undang ini tidak selalu berarti suatu tindak pidana bisnis. Dapat menjadi tindak pidana bisnis dalam bidang lingkungan hidup apabila perusahaan (industri) dalam melaksanakan kegiatannya, merusak atau mencemari lingkungan hidup. Adapun rumusan perbuatan dilarang tersebut adalah : Sengaja merusak, mencemari lingkungan hidup (Pasal 22 ayat (1)).

c. Undang-Undang No. 5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian

Perbuatan-perbuatan yang dapat dimasukkan sebagai tindak pidana bisnis dalam undang-undang ini adalah sebagai berikut :

1. Sengaja mendirikan, memperluas industri tanpa izin atau tidak memenuhi kewajiban menyampaikan informasi industri (Pasal 24 ayat (1))
2. Melakukan peniruan desain (Pasal 25)
3. Melanggar standar bahan baku (Pasal 26)

4). C.S.T. Kansil, Pokok-Pokok Hukum Perindustrian di Indonesia, (Jakarta, IND-HIL-CO, 1986), hal. 46

4. Pelanggaran terhadap keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam (Pasal 27 ayat (1)).

d. Undang-Undang No. 7 Tahun 1987 Tentang Hak Cipta

Dalam undang-undang ini, yang termasuk tindak pidana bisnis dirumuskan dalam Pasal 44 sebagai berikut :

1. Mengumumkan, memperbanyak suatu ciptaan tanpa hak atau memberi izin untuk itu
2. Menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, menjual hasil pelanggaran hak cipta.

e. Undang-Undang No. 6 Tahun 1989 Tentang Paten

Undang-Undang ini merumuskan perbuatan yang termasuk tindak pidana bisnis adalah sebagai berikut :

Membuat, menjual, menyewakan, menyerahkan, memakai, menyediakan untuk dijual atau disewakan, atau diserahkan hasil produksi atau menggunakan proses produksi yang telah diberi paten tanpa hak (Pasal 126).

f. Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Perbuatan-perbuatan yang termasuk tindak pidana bisnis dalam undang-undang ini adalah sebagai berikut :

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan atau dipersamakan dengan itu, tanpa izin (Pasal 46 ayat (1))

2. Memberi keterangan yang wajib dirahasiakan oleh bank (Pasal 47 ayat (2))
3. Membuat, menyebabkan adanya laporan palsu, menghilangkan, tidak memasukan, mengubah laporan atau pencatatan dalam pembukuan (Pasal 49 ayat (1)).

Undang-undang perbankan ini menetapkan bahwa suatu badan hukum dapat menjadi pelaku tindak pidana bisnis, yang dapat dibaca dalam Pasal 46 ayat (2) sebagai berikut :

"(2). Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, perserikatan, yayasan atau koperasi, maka penuntutan terhadap badan-badan dimaksud dilakukan baik terhadap mereka yang memberikan perintah melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau terhadap keduanya"⁵⁾

Berdasarkan uraian beberapa undang-undang tersebut di atas maka ternyata bahwa, hanya ada beberapa pasal saja dari tiap-tiap undang-undang yang diangkat menjadi ketentuan tindak pidana bisnis.

Jenis-jenis tindak pidana bisnis yang diatur dalam beberapa undang-undang yang disebutkan di atas (undang-undang di luar KUHP dan UU-TPE) dapat dikemukakan sebagai berikut :

5). Y. Sunyoto, *Hukum Perbankan di Indonesia*, (Surakarta, Sebelas Maret, 1995), hal. 74

1. Tindak pidana bisnis dalam bidang pendirian perusahaan
2. Tindak pidana bisnis dalam bidang produksi
3. Tindak pidana bisnis dalam bidang pemasaran.

Adapun perbuatan-perbuatan yang dilarang menurut kategorisasi tindak pidana bisnis yang diatur dalam undang-undang di luar KUHP dan UU-TPE adalah sebagai berikut :

1. Perbuatan yang dilarang pada tindak pidana bisnis dalam bidang pendirian perusahaan :
 - a. mendirikan perusahaan tanpa izin atau tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan, atau merusak lingkungan
 - b. tidak memenuhi kewajiban sehubungan dengan perusahaannya.
2. Perbuatan yang dilarang pada tindak pidana bisnis dalam bidang produksi :
 - a. menyebabkan rusaknya lingkungan hidup
 - b. meniru desain produk perusahaan lain
 - c. menggunakan bahan baku di luar dari yang ditetapkan pemerintah
 - d. memperbanyak suatu ciptaan tanpa izin yang berhak
 - e. menggunakan proses produksi yang telah menjadi hak perusahaan lain
 - f. membuat laporan transaksi tidak sebagaimana mestinya.

3. Perbuatan yang dilarang pada tindak pidana bisnis dalam bidang pemasaran :

- a. menyiarkan, memamerkan, mengedarkan dan menjual suatu barang hasil pelanggaran hak cipta
- b. membeberkan keterangan yang wajib dirahasiakan
- c. memperoleh keuntungan pribadi terhadap penjualan atau pembelian surat-surat berharga dari bank.

Berdasarkan perbuatan-perbuatan yang dilarang di atas maka dapat dikatakan bahwa undang-undang yang mengatur tindak pidana bisnis di luar KUHP dan UU-TPE, selain memberikan kesempatan usaha-usaha bisnis berkembang diberbagai bidang, juga mengawasi jangan sampai pelaksanaan dan perkembangan bisnis tersebut merugikan masyarakat, pengusaha dan negara. Sehubungan dengan itu, maka nampaknya kebijakan kriminalisasi dalam bidang bisnis, ditempuh dengan melalui pendekatan kebijakan karena harus mempertimbangkan berbagai faktor seperti, perbuatan, keadaan sosial, ekonomi dan tujuan yang hendak dicapai oleh hukum pidana itu sendiri. Hanya saja, untuk mengembangkan pendekatan kebijakan secara sempurna mungkin belum dilakukan karena untuk merumuskan perbuatan pidana secara rasional dalam undang-undang, harus dilakukan dengan penelitian yang memberikan bahan atau masukan untuk

perumusan itu. Inilah yang belum dilakukan oleh badan legislatif, sebagaimana yang dikatakan Barda Nawawi Arief, bahwa "Dalam praktek perundang-undangan di Indonesia, pertimbangan-pertimbangan yang berorientasi pada kebijakan tampaknya belum dikembangkan sepenuhnya sebagai suatu kebijakan ilmiah dalam arti kebijakan yang ditunjang oleh data empiris"⁶⁾

Terutama dalam bidang hukum pidana bisnis, pendekatan kebijakan secara sempurna sebagaimana disebutkan di atas masih sangat jauh, seperti penelitian mengenai biaya pembuatan undang-undang yang mengatur tindak pidana bisnis dengan hasil yang akan dicapai, begitu pula pengaruh sosial dari kriminalisasi dan dekriminalisasi dalam bidang bisnis yang berkenaan dengan atau dipandang dari pengaruh-pengaruhnya yang sekunder. Menurut Basiouni bahwa hal ini disebabkan karena proses legislatif belum siap untuk pendekatan yang demikian. Masalahnya antara lain, terletak pada sumber-sumber keuangan untuk melakukan orientasi ilmiah itu"⁷⁾

Selain pendekatan kebijakan sebagaimana dikemukakan di atas, perumusan perbuatan pidana

6). Barda Nawawi Arief, Op.cit, hal. 81

7). Barda Nawawi Arief, Op.cit, hal. 36

bisnis juga menggunakan pendekatan nilai, yaitu adanya nilai-nilai yang ingin dicapai dan dilindungi oleh hukum pidana. Tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh hukum pidana bisnis tersebut di atas umumnya terwujud dalam kepentingan-kepentingan sosial ekonomi yang mengandung nilai-nilai tertentu. Kepentingan sosial ekonomi dimaksud adalah :

1. Memelihara tata tertib
2. Memberikan perlindungan hukum kepada pengusaha dan masyarakat agar usaha bisnis dapat dilakukan dengan sehat dan bertanggung jawab sekaligus mencegah praktek-praktek yang merugikan kepentingan masyarakat
3. Memberikan perlindungan hukum yang akan mewujudkan dan mampu mendorong perkembangan dan penyelenggaraan usaha bisnis.

Dilihat dari sanksi pidana yang diancamkan terhadap tindakan pidana bisnis dalam undang-undang di luar KUHP adalah sangat bervariasi yaitu pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana tambahan. Untuk jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel : IV. Jenis Sanksi Pidana yang Ditetapkan
Dalam Undang-Undang di Luar KUHP

| Undang-Undang yang Mengatur Tindak Pidana Bisnis di Luar KUHP | Jenis Sanksi Pidana yang Ditetapkan | | | |
|---|-------------------------------------|----------|-------|----------|
| | Penjara | Kurungan | Denda | Tambahan |
| UU. Wajib Daftar Perusahaan | + | + | + | - |
| UU. Lingkungan hidup | + | + | + | - |
| UU. Perindustria | + | + | + | + |
| UU. Hak Cipta | + | - | + | - |
| UU. Paten | + | - | + | - |
| UU. Perbankan | + | - | + | - |

Berdasarkan Tabel IV di atas, dapat dikatakan bahwa kebijakan menetapkan sanksi pidana terhadap tindak pidana bisnis, masih berorientasi pada pidana penjara dan pidana denda. Hal ini terbukti di dalam undang-undang yang mengatur tindak pidana bisnis di luar KUHP dan UU-TPE, masih lebih banyak menggunakan pidana penjara dan pidana denda dalam usaha menanggulangi tindak pidana bisnis. Tetapi sudah ada satu undang-undang (undang-undang perindustrian) yang menetapkan adanya pidana tambahan yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana bisnis, yaitu berupa pencabutan izin usaha industri, yang dapat dibaca dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 sebagai berikut :

"Barang siapa dengan sengaja melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 di pidana penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), dengan hukuman tambahan dicabut izin usaha industrinya"⁸⁾.

8) C.S.T. Kansil, Op.cit, hal. 24

Penetapan sanksi pidana yang berorientasi kepada pidana penjara dan pidana denda seperti tersebut di atas, dapat berarti bahwa perampasan kemerdekaan dan pemberian beban untuk membayar sejumlah uang, masih dianggap sarana yang ampuh untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana bisnis.

Selain sanksi-sanksi pidana yang disebutkan di atas, terdapat pula sanksi administratif yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana bisnis, khususnya pelaku tindak pidana bisnis dalam bidang perbankan. Mengenai sanksi administratif ini, dapat dibaca dalam Pasal 52 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 sebagai berikut :

"Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Pasal 48 dan Pasal 49 Bank Indonesia dapat menetapkan sanksi administratif kepada Bank yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam undang-undang ini atau menyampaikan pertimbangan kepada Menteri untuk mencabut izin usaha bank yang bersangkutan"⁹⁾.

Ditinjau dari perumusan sanksi pidana yang ditetapkan terhadap tindak pidana bisnis, ternyata bahwa sanksi pidana tersebut ada yang dirumuskan secara tunggal, adapula yang dirumuskan secara alternatif, kumulatif dan kumulatif-alternatif. Untuk mengetahui sejauh mana perumusan jenis sanksi pidana tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

9). Y. Sunyoto, Op. cit, hal. 230

Tabel : V. Perumusan Sanksi Pidana Terhadap Tindak
Pidana Bisnis Dalam Undang-Undang di
Luar KUHP

| UU | Psl yang Mengatur Tindak Pidana Bisnis | Sanksi Pidana | | | Perumusan |
|--------------------|--|---------------|----------|-------|--------------------------|
| | | Penjara | Kurungan | Denda | |
| UU No.3 Th.1982 | 32 ayat (1) | + | - | + | Alternatif |
| | 33 ayat (1) | - | + | + | Alternatif |
| | 34 ayat (1) | - | + | + | Alternatif |
| UU No.4 Th.1982 | 22 ayat (1) | + | - | + | Kumulatif- Alternatif |
| UU No.5 Th.1984 | 24 ayat (1) | + | - | + | Alternatif |
| | 25 | + | - | + | Alternatif |
| | 26 | + | - | + | Alternatif |
| | 27 ayat (1) | + | - | + | Kumulatif- Alternatif |
| UU No.7 Th.1987 | 44 ayat (1) | + | - | + | Kumulatif- Alternatif |
| | ayat (2) | + | - | + | Kumulatif- Alternatif |
| UU No.6 Th.1989 | 126 | + | - | + | Kumulatif |
| UU No.4 Th.1992 | 46 ayat (1) | + | - | + | Kumulatif |
| | 47 ayat (2) | + | - | + | Kumulatif |
| | 49 ayat (1) | + | - | + | Kumulatif |

Tabel 5 diatas menggambarkan bahwa sanksi-sanksi pidana terhadap tindak pidana bisnis yang terdapat dalam undang-undang di luar KUHP dapat diuraikan sebagai berikut : yang terdapat dalam Undang-Undang No. 3 tahun 1982 terdiri dari pidana penjara yang dirumuskan secara alternatif dengan pidana denda, dan pidana kurungan yang dirumuskan secara alternatif dengan pidana denda. Sanksi pidana yang terdapat dalam Undang-Undang No. 4 tahun 1982 terdiri dari pidana penjara dan pidana

denda yang dirumuskan secara kumulatif-alternatif. Sanksi pidana yang terdapat dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1984 adalah pidana penjara dan pidana denda yang dirumuskan secara alternatif dan kumulatif-alternatif. Sanksi pidana yang terdapat dalam Undang-Undang No. 7 tahun 1987 terdiri dari pidana penjara dan pidana denda yang dirumuskan secara alterantif. Dan sanksi pidana yang terdapat dalam Undang-Undang No. 6 tahun 1989 adalah pidana penjara dan pidana denda yang dirumuskan secara kumulatif. Sedangkan sanksi pidana yang terdapat dalam Undang-Undang No. 4 tahun 1992 adalah pidana penjara dan pidana denda yang dirumuskan secara kumulatif.

Perumusan sanksi pidana di atas, menggambarkan bahwa, kebijakan merumuskan sanksi pidana bisnis secara tunggal dalam undang-undang di luar KUHP mulai ditinggalkan. Hal ini terbukti tidak ada lagi jenis sanksi pidana yang dirumuskan secara tunggal. Sebaliknya kebijakan hukum pidana tersebut, lebih berorientasi kepada individualisasi pidana. Ini terlihat banyaknya sanksi pidana yang dirumuskan secara alternatif dan kumulatif-alternatif, dimana perumusan seperti ini memberikan kebebasan kepada hakim untuk memilih sanksi pidana yang cocok kepada pelaku tindak pidana bisnis.

Sedangkan sanksi pidana yang dirumuskan secara kumulatif, merupakan keseimbangan antara perlindungan masyarakat dengan pemulihan keseimbangan nilai ekonomi yang terganggu dalam masyarakat. Selain itu, dalam kenyataan sering pula terungkap bahwa penyelesaian masalah tindak pidana bisnis dengan hanya menjatuhkan pidana penjara saja belum dirasakan oleh warga masyarakat sebagai suatu penyelesaian masalah secara tuntas.

Penggunaan sanksi pidana denda dianggap sesuai dengan tindak pidana bisnis sebagai bagian dari tindak pidana ekonomi, dimana penerapan sanksi pidana denda itu dapat berarti yang harus didahulukan ialah tindakan yang memungkinkan pengembalian kerugian-kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana bisnis tersebut, sementara kegiatan-kegiatan bisnis tetap berjalan untuk menuju kepada pertumbuhan ekonomi (economic growth).

Dilihat dari lamanya atau beratnya sanksi pidana yang diancamkan terhadap tindak pidana bisnis dalam undang-undang di luar KUHP adalah sebagai berikut :(pada hal 79)

Tabel : VI. Berat/lamanya sanksi pidana terhadap tindak pidana bisnis yang ditetapkan dalam undang-undang di luar KUHP

| UU | Psl yang Mengatur Tindak Pidana Bisnis | Sanksi Pidana | | |
|--------------------|--|---------------|----------|-----------|
| | | Penjara | Kurungan | Denda |
| UU No.3 Th.1982 | 32 ayat (1) | 3 bulan | - | 3 juta |
| | 33 ayat (1) | - | 3 bulan | 1,5 juta |
| | 34 ayat (1) | - | 2 bulan | 1 juta |
| UU No.4 Th.1982 | 22 ayat (1) | 10 tahun | - | 100 juta |
| UU No.5 Th.1984 | 24 ayat (1) | 5 tahun | - | 25 juta |
| | 25 | 2 tahun | - | 10 juta |
| | 26 | 5 tahun | - | 25 juta |
| | 27 ayat (1) | 10 tahun | - | 100 juta |
| UU No.7 Th.1987 | 44 ayat (1) | 7 tahun | - | 100 juta |
| | ayat (2) | 5 tahun | - | 50 juta |
| UU No.6 Th.1989 | 126 | 7 tahun | - | 100 juta |
| UU No.4 Th.1992 | 46 ayat (1) | 15 tahun | - | 10 milyar |
| | 47 ayat (2) | 2 tahun | - | 2 milyar |
| | 49 ayat (1) | 15 tahun | - | 10 milyar |

Berdasarkan Tabel VI diatas, maka dapat dikemukakan bahwa lamanya sanksi pidana yang terdapat dalam Undang-Undang No. 3 tahun 1982 adalah kurungan 2 bulan sampai dengan penjara 3 bulan, dengan denda 1 juta rupiah sampai dengan 3 juta rupiah. Lama/beratnya sanksi pidana yang terdapat dalam Undang-Undang No. 4 tahun 1982 adalah pidana penjara 10 tahun dengan denda 100 juta rupiah. Sanksi pidana yang terdapat dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1984 adalah pidana penjara 2 tahun sampai dengan 10 tahun dengan denda 10 juta rupiah sampai dengan 100 juta rupiah.

Sanksi pidana yang terdapat dalam Undang-Undang No. 7 tahun 1987 adalah penjara 5 tahun sampai dengan 7 tahun dengan denda 50 juta sampai dengan 100 juta rupiah. Dan yang terdapat dalam Undang-Undang No. 6 tahun 1989 adalah penjara 7 tahun dengan denda 100 juta rupiah, sedangkan yang terdapat dalam Undang-Undang No. 4 tahun 1992 adalah pidana penjara 7 tahun sampai dengan 15 tahun dengan denda 2 milyar sampai dengan 10 milyar rupiah.

Dari uraian di atas, dapat dikatakan bahwa sanksi pidana terhadap tindak pidana bisnis yang paling rendah adalah kurungan dua bulan atau pidana denda satu juta rupiah dan itu dikenakan kepada pelaku tindak pidana bisnis dalam bidang wajib daftar perusahaan. Sedangkan sanksi pidana yang paling tinggi adalah pidana penjara lima belas tahun dan denda sepuluh milyar rupiah dan sanksi pidana ini dikenakan kepada pelaku tindak pidana bisnis dalam bidang perbankan.

Dilihat dari ancaman pidana maksimum khusus terhadap tindak pidana bisnis, dapat dikatakan bahwa maksimum hukuman untuk tindak pidana yang tergolong sangat ringan, diancam pidana kurungan 2 bulan sampai 3 bulan. Tindak pidana yang tergolong ringan diancam pidana penjara 3 bulan, tindak pidana bisnis yang tergolong sedang diancam pidana 2 sampai dengan 5 tahun. Tindak pidana bisnis yang tergolong berat diancam pidana penjara 5 tahun sampai dengan 7 tahun

dan untuk tindak pidana bisnis yang tergolong sangat berat/serius diancam pidana penjara 15 tahun.

Uraian tersebut di atas dapat digambarkan dalam Tabel VII berikut ini.

Tabel : VII. Bobot Tindak Pidana Bisnis dan Sanksi Pidana Maksimum

| Bobot Tindak Pidana Bisnis | Lama/Beratnya Ancaman Pidana | | |
|----------------------------|------------------------------|---------------------|----------------------|
| | Penjara | Kurungan | Denda |
| "sangat ringan" | - | 2 bulan s/d 3 bulan | 1 juta s/d 1,5 juta |
| "ringan" | 3 bulan | - | 3 juta |
| "sedang" | 2 s/d 5 tahun | - | 10 juta s/d 25 juta |
| "berat" | 5 s/d 10 tahun | - | 50 juta s/d 100 juta |
| "sangat berat/serius" | 15 tahun | - | 2 s/d 10 milyar |

Tabel di atas menunjukkan bahwa kebijakan menetapkan lama/beratnya sanksi pidana terhadap tindak pidana bisnis dalam undang-undang di luar KUHP, masih mengikuti kebijakan penetapan sanksi pidana yang ada dalam KUHP, yang nampak sangat berbeda adalah beratnya pidana denda. Di dalam undang-undang bisnis di luar KUHP terlihat adanya pidana denda yang cukup tinggi yaitu untuk tindak pidana bisnis yang tergolong sangat ringan saja, diancam pidana denda maksimum 1 juta sampai dengan 1,5 juta rupiah apalagi untuk tindak pidana bisnis yang tergolong sangat berat/serius diancam pidana denda maksimum 10 milyar rupiah.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, dapat dikatakan bahwa kebijakan legislatif merumuskan dan

menetapkan perbuatan dan sanksi pidana terhadap tindak pidana bisnis dalam undang-undang di luar KUHP sudah cukup memadai dan dapat menunjang usaha penanggulangan tindak pidana bisnis.

Usaha penanggulangan tersebut dapat dikatakan sangat serius dan bersungguh-sungguh karena adanya sanksi pidana denda yang cukup berat. Penetapan pidana denda yang cukup berat itu dirasakan sangat sesuai, mengingat tindak pidana bisnis lebih berorientasi pada harta kekayaan dari pada kebebasan atau kemerdekaan yang pada umumnya dilakukan oleh pengusaha.

Selain itu, penetapan pidana tambahan dan sanksi administratif yang berupa pencabutan izin usaha merupakan tindakan represif bagi perusahaan yang benar-benar tidak mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku. Begitu pula ditetapkannya perusahaan sebagai subjek hukum yang dapat melakukan tindak pidana bisnis merupakan antisipasi terhadap berkembangnya tindak pidana bisnis.

B. Penegakan Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Bisnis

Berbicara mengenai penegakan hukum pidana terhadap sesuatu perbuatan (peristiwa), tentu orientasinya tidak terlepas dari proses penyelesaian suatu kasus (perkara) pidana melalui prosedur hukum. Sedangkan prosedur hukum dimaksud adalah penyelesaian

melalui peradilan pidana, atau dengan kata lain jika terjadi pelanggaran terhadap undang-undang pidana, maka undang-undang itu harus dilaksanakan dan menjadi kenyataan.

Dalam melaksanakan aturan hukum dan ditegakkannya hukum, ada tiga unsur yang harus diperhatikan yaitu "kepastian hukum (Rechtssicherheit), kemanfaatan hukum (Weckmassegkeit), dan keadilan (Gerechtigkeit)"¹⁰⁾

Bertitik tolak pada unsur tersebut di atas, dan apabila ditekankan kepada kepastian hukumnya, maka ini berarti bahwa setiap orang mengharapkan dapat diterapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa kongkrit. Hukum itulah yang harus dilaksanakan dan tidak boleh menyimpang. Kepastian hukum merupakan perlindungan bagi yustisiabile terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan menciptakan ketertiban masyarakat.

Sebaliknya masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum itu adalah untuk manusia, maka pelaksanaan dan penegakan hukum

10). S. Mertokusumo, Mengenal Hukum (suatu pengantar), (Jogyakarta, Liberty, 1986), hal. 130

harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat, jangan sampai karena ditegakkannya hukum justru menimbulkan keresahan di dalam masyarakat.

Keadilan dalam pelaksanaan atau penegakan hukum sangat diperhatikan, karena dalam pelaksanaan dan penegakan hukum harus adil, tetapi harus pula diingat bahwa hukum itu tidak identik dengan keadilan. Dalam hubungan inilah perlu diungkapkan bahwa sampai seberapa jauh pelaksanaan aturan hukum tersebut sehingga dengan demikian hukum dapat menjalankan fungsinya yaitu memberi perlindungan kepada masyarakat agar dapat hidup sejahtera.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana bisnis, merupakan upaya agar setiap orang/badan hukum mematuhi dan menghormati ketentuan hukum yang berlaku dalam bidang bisnis. Upaya ini tentunya tidak terlepas dari tindakan represif yaitu dengan memberi hukuman kepada barang siapa yang melanggar ketentuan hukum pidana bisnis disamping berfungsi sebagai upaya preventif.

Dalam rangka penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana bisnis, bukan hanya tugas dari penegak hukum (polisi, jaksa dan hakim), tetapi upaya penegakan itu melibatkan juga beberapa instansi terkait. Oleh karena itu perlu adanya koordinasi dan persepsi yang sama antara penegak hukum dan instansi terkait mengenai penerapan ketentuan pidana bisnis.

Selain masalah koordinasi dan persepsi yang sama terhadap pelaksanaan undang-undang yang mengatur tentang bisnis, ada pula beberapa faktor yang turut mempengaruhi proses penerapan hukum pidana seperti sikap dan pengetahuan penegak hukum dalam menangani suatu tindak pidana, sehingga hal tersebut dapat menunjang penegakan hukum terhadap tindak pidana bisnis, dalam hubungan inilah penulis akan mencoba mengungkapkan tentang penegakan ketentuan pidana bisnis oleh para penegak hukum.

1. Gambaran Umum Tindak Pidana Bisnis yang Terjadi

Gambaran tentang keadaan kasus dan ketentuan-ketentuan bisnis yang dilanggar dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel : VIII. Jenis Tindak Pidana Bisnis dan Peraturan yang Dilanggar

| Tahun | Jenis Tindak Pidana Bisnis | Pasal yang Dilanggar |
|--------------|--|---|
| 1995 | Tindak pidana Hak Cipta | 44 ayat (1) dan ayat (2).UU.No.7 Tahun 1987 |
| | Tindak pidana persaingan | 382 bis KUHP |
| | Tindak pidana perbankan | 47 ayat (2) UU.No. 7 Tahun 1992 |
| | Pemalsuan akte otentik Menyuruh memasukan keterangan palsu dalam akte otentik | 264 ayat (1) KUHP 266 ayat (1) KUHP |
| 1996 | Pemalsuan akte otentik Menyuruh memasukan keterangan palsu | 264 ayat (1) KUHP 266 ayat (1) KUHP |
| Jul1 1997 | Menggunakan surat palsu | 264 ayat (2) KUHP 264 ayat (2) KUHP |

Sumber data : Poltabes Semarang

Data yang diperlihatkan dalam tabel VIII di atas, memberi gambaran bahwa selama kurung waktu

tiga tahun terakhir (1995 s/d Juli 1997). tindak pidana yang terjadi hanyalah berkisar pada pelanggaran undang-undang hak cipta, KUHP dan undang-undang perbankan, tetapi yang paling banyak adalah pelanggaran tindak pidana bisnis yang diatur dalam KUHP, khususnya Pasal 264 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 266 ayat (1) serta Pasal 382 bis KUHP.

Apabila tindak pidana tersebut di atas di lihat berdasarkan kategorisasi tindak pidana bisnis, maka ternyata bahwa tindak pidana tersebut termasuk tindak pidana bisnis dalam bidang pendirian perusahaan, dalam bidang produksi dan dalam bidang pemasaran.

Tindak pidana bisnis yang terdapat dalam tabel di atas bukanlah merupakan jumlah yang pasti, karena sebenarnya masih banyak tindak pidana bisnis yang pernah terjadi namun tidak terdaftar dalam register perkara di kepolisian. Seperti diungkapkan bahwa beberapa penyidik pernah menangani tindak pidana bisnis berupa bilyet kosong, pemalsuan merek dagang, giro, mendirikan bank tanpa izin. Dengan demikian ternyata masih sering terjadi tindak pidana bisnis yang diatur dalam undang-undang di luar KUHP dan UU-TPE, akan tetapi tidak sempat tercatat dalam daftar perkara.

Selanjutnya diakui bahwa sesungguhnya tindak pidana bisnis yang terjadi jauh lebih banyak

Jumlahnya, baik yang diatur dalam KUHP maupun di luar KUHP, hanya saja pihak yang dirugikan dalam tindak pidana itu enggan melaporkan kepada pihak yang berwajib untuk diproses sebagai perkara pidana dengan alasan memerlukan waktu dan biaya yang banyak.

Selain kurangnya tindak pidana bisnis yang terdaftar karena keadaan-keadaan sebagaimana disebutkan di atas, ternyata bahwa tidak semua tindak pidana bisnis yang masuk atau terdaftar diproses atau diperiksa sampai pada tingkat pengadilan. Untuk memperoleh gambaran tentang sejauh mana tindak pidana yang masuk (terdaftar) diproses oleh penegak hukum dapat dilihat pada tabel IX di bawah ini.

Tabel : IX. Tindak Pidana Bisnis yang Terdaftar dan Diproses oleh Penegak Hukum

| Instansi Penegak Hukum dan Perindag | Tahun terjadinya Tindak Pidana Bisnis | | | Keterangan |
|--|--|------|--------------|----------------------|
| | 1995 | 1996 | Juli 1997 | |
| Kotabes Semarang | 5 | 2 | 1 | tidak ter- daftar |
| Kejaksaan | 1 | 1 | - | |
| Pengadilan | - | 1 | - | |
| Perindustrian dan Perdagangan | - | - | - | |

Sumber data : Kotabes Semrang
Kejaksaan
Pengadilan
Kantor Perindustrian dan Perdagangan

Tabel tersebut di atas menggambarkan bahwa dalam penanganan tindak pidana bisnis, masih sering

mengalami hambatan seperti terlihat dalam data, jumlah perkara (kasus) yang diperiksa oleh polisi (penyidik) lebih banyak ketimbang yang dilanjutkan kepada kejaksaan (penuntut umum). Begitu juga yang diperiksa oleh kejaksaan (penuntut umum), lebih banyak dari pada yang dilanjutkan ke pengadilan. Sedangkan pada kantor perdagangan dan perindustrian, tidak tercatat adanya tindak pidana bisnis yang terjadi, tetapi tidak berarti instansi tersebut tidak pernah menangani kasus-kasus tindak pidana bisnis. karena dari hasil wawancara dengan beberapa pejabat dari instansi tersebut sering pula menerima laporan tentang adanya pelanggaran bisnis oleh perusahaan-perusahaan seperti tidak menyampaikan informasi industri secara berkala, hanya saja penyelesaian ke dalam dengan pemberian sanksi administratif.

Ada beberapa kendala yang menyebabkan perkara tindak pidana bisnis tidak dilanjutkan pemeriksaan ke kejaksaan (ke penuntut umum) ataupun ke pengadilan, yaitu karena kurangnya bukti-bukti yang mendukung untuk dilanjutkan pemeriksaan perkara tersebut. Selain itu polisi pemeriksa (penyidik) sering kali mendapat pengaruh dari atas (atasan) agar perkara tindak pidana bisnis tersebut tidak diproses sebagaimana mestinya. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Unit Reserse Poltabes Semarang bahwa "Tindak pidana bisnis yang ditangani di Poltabes

Semarang sering mendapat pengaruh-pengaruh dari luar hukum, bahkan dikatakan bahwa pada akhir-akhir ini pengaruh itu lebih dominan". Apa yang diungkapkan di atas dapat saja terjadi mengingat pelaku tindak pidana bisnis umumnya golongan ekonomi kuat, sehingga dengan kemampuannya dapat mempengaruhi oknum polisi tertentu agar perkaranya tidak diproses sebagaimana mestinya. Begitu pula tindak pidana bisnis sering diselesaikan secara kekeluargaan antara pelaku tindak pidana dengan pihak yang dirugikan, padahal baik dalam undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana bisnis, maupun dalam KUHAP tidak mengatur penyelesaian perkara seperti itu.

Di atas telah diungkapkan bahwa banyak tindak pidana bisnis tidak dilanjutkan pemeriksaannya, sebab faktor yang disebut di atas, namun sisi lain yang perlu digaris bawahi dalam penerapan hukum adalah perlu ada persamaan persepsi terhadap suatu kasus, sebab jika tidak ada persamaan persepsi, maka bisa terjadi perbedaan dalam menerapkan suatu peraturan hukum terutama bagi penegak hukum yang secara langsung menangani kasus-kasus yang terjadi.

Dalam hubungan ini, mungkin ada baiknya diungkapkan suatu contoh kasus yang diputus oleh pengadilan negeri Semarang.

Kasus posisi :*)

Bahwa Drs. Yhung Hermanto bersama dengan Drs. Imam Yuwono pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 1991 di Kantor Notaris R. Sularso. T Jalan M.T. Haryono 615 telah melakukan, menyuruh memasukan keterangan palsu dalam suatu akte otentik, perbuatan mana menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening sehingga Bank Duta menderita kerugian Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

Terhadap kasus di atas jaksa (penuntut umum) mengajukan tuntutan atau dakwaan dalam alternatif kepada terdakwa sebagai berikut :

Primer : Pasal 49 ayat (1)a Undang-Undang No. 7 tahun 1992 yo Pasal 55 KUHP.

Subsider :

1. Pasal 266 ayat (1) KUHP
2. Pasal 49 ayat (2)b Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 yo Pasal 55 KUHP.

Tuntutan atau dakwaan yang dalam bentuk alternatif digunakan oleh jaksa (penuntut umum) dimaksudkan apabila salah satu dari dakwaan tersebut terbukti maka dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi.

*) Surat Keputusan Pengadilan Negeri Semarang, No. 18/PID/B/1997, tanggal 21 Mei 1997

Selanjutnya Pengadilan Negeri Semarang tanggal 21 Mei 1997/No. 18/PID/B/1997/PN. SMR, mengadili dan menyatakan terdakwa-terdakwa Drs. Yhung Hermanto dan Drs. Imam Yuwono secara sah dan menyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana menyuruh memasukkan keterangan palsu dalam akte otentik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP dan oleh karena itu masing-masing terdakwa dipidana penjara 6 bulan dalam masa percobaan 1 tahun.

Apabila dikaji mengenai keputusan Pengadilan Negeri Semarang di atas, maka paling tidak yang menjadi dasar pertanyaan, apa dasar pertimbangan hakim sehingga dalam memutus kasus tersebut menggunakan Pasal 266 ayat (1) KUHP ketimbang menggunakan Pasal 49 ayat (1) UU No. 7/1992 jo Pasal 55 KUHP seperti yang didakwakan oleh jaksa (penuntut umum) dalam dakwaan primer. Sebab apabila dilihat dari kedudukan terdakwa sebagai pegawai Bank dimana perbuatan itu dilakukan, lebih tepat apabila penerapan hukumnya dikenakan Pasal 49 ayat (1)a.

Ada beberapa pertimbangan keputusan Pengadilan Negeri Semarang dalam putusannya antara lain :

Menimbang bahwa perbuatan terdakwa menyuruh memasukkan keterangan palsu dalam suatu akte otentik tidak dapat ditafsirkan sebagai membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam

pembukuan atau dalam laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, bukan pula perbuatan yang tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank terhadap ketentuan dalam undang-undang oleh karena itu dakwaan primer dan subsider dua tidak perlu dipertimbangkan.

Menimbang bahwa dalam Pasal 266 ayat (1) mempunyai unsur sebagai berikut :

Menyuruh memasukkan

suatu keterangan palsu

dalam suatu akte otentik

dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai seolah-olah keterangan itu benar.

Menimbang bahwa keterangan saksi yang disumpah dan menyatakan bahwa benar terdakwa menyuruh saksi memasukkan keterangan dalam suatu akad perjanjian kredit, yang setelah dihubungkan dengan keterangan terdakwa di muka sidang yang mengatakan bahwa perbuatan itu dilakukan karena debitur menjanjikan 15 % dari kredit itu.

Menimbang bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut di atas maka dakwaan haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan setelah melihat dakwaan jaksa (penuntut umum) yang dibuat dalam bentuk alternatif, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang bahwa karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan, terdakwa harus dipidana.

Menimbang bahwa sebelum majelis menyatakan pidana atas diri terdakwa terlebih dahulu dinyatakan bahwa terdakwa dipidana karena tindakannya dapat menimbulkan kerugian bagi keuangan negara.

Apabila dikaji lebih jauh tentang dasar pertimbangan hakim dalam menerapkan aturan hukum, maka dibutuhkan suatu keberanian untuk melakukan suatu terobosan dalam memperlakukan suatu ketentuan yang mengatur tindak pidana bisnis yang relatif masih baru seperti Undang-Undang Perbankan No. 7 Tahun 1992 yang menjadi dasar dakwaan jaksa (penuntut umum) sebagai dakwaan primer dan dakwaan subsidiar dua.

Terobosan yang dilakukan oleh jaksa (penuntut umum) dalam kasus di atas masih kecil artinya, bila dibandingkan dengan yang dilakukan oleh jaksa/ penuntut umum S. Santosa yang pernah mendapat hadiah kalpataru pada hari lingkungan hidup sedunia tanggal 5 Juni 1989 untuk kategori pembinaan lingkungan hidup yang pertama kalinya dari kalangan penegak hukum.

Ketika jaksa (penuntut umum) S. Santoso bertugas di Sorong Irian Jaya mengetahui terlibatnya seorang dokter atas nama dokter Peter

Suhada dalam kasus penyelundupan 163 ekor burung cenderawasih. langsung menuntut terdakwa dengan dakwaan pengrusakan lingkungan hidup berdasarkan Pasal 22 ayat (1) yo Pasal 6 Dierenbeschermings Ordonnantie 1931 dan merupakan tindak pidana bisnis dalam bidang lingkungan hidup yang pertama diajukan ke pengadilan serta diputuskan oleh pengadilan negeri Sorong tanggal 29 Nopember 1984.

Terdapat perbedaan ancaman pidana yang menyolok antara Pasal 22 ayat (1) UULH dengan Pasal 6 Dierenbeschermings Ordonnantie. Ancaman pidana dalam Pasal 22 ayat (1) UULH adalah 10 tahun penjara dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah). Menurut Dierenbeschermings Ordonnantie, ancaman hukumannya adalah kurungan setingginya tiga bulan atau denda besar-besarnya Rp. 500 (lima ratus rupiah) di samping perampasan benda.

Jaksa/penuntut umum maupun hakim menerapkan UULH sebagai dasar hukuman sesuai dengan *adagium lex posterior derogat legi priori*. Terdakwa dokter Peter Suhada dinyatakan secara sah dan menyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi hukuman penjara selama-lamanya empat tahun enam bulan dan denda sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan bahwa jika denda tidak dibayar harus diganti dengan hukuman kurungan selama enam bulan.

Pengadilan tinggi Irian Jaya di Jayapura dalam sidang tanggal 2 Maret 1985, memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sorong sehingga berbunyi, menghukum terdakwa dengan pidana penjara enam tahun dikurangi tahanan sementara dan menetapkan bahwa barang bukti berupa 43 ekor burung cenderawasih (40 ekor mati dan 3 masih hidup) diserahkan kepada perlindungan dan pelestarian alam (PPA).

Ada dua hal yang patut dicatat dari tuntutan Jaksa (penuntut umum) S. Santoso yaitu :

- a. Sebelum orang lain melakukannya dia sudah mempunyai keberanian untuk menggunakan Undang-Undang No. 4 Tahun 1982 UULH sebagai landasan tuntutan, pada hal peraturan pelaksanaan undang-undang tersebut belum dikeluarkan pada waktu itu, sehingga dapat dikatakan suatu yang amat luar biasa karena kebanyakan aparat penegak hukum tertentu enggan menggunakan suatu undang-undang jika belum ada peraturan pelaksanaannya atau karena undang-undang tersebut masih baru.
- b. Rumusan sanksi pidana kebanyakan bersifat pilihan antara hukuman alternatif dan kumulatif. Dan yang sering digunakan aparat penegak hukum adalah alternatif saja. Tetapi Jaksa (penuntut umum) S. Santoso langsung menuntutnya dengan hukuman kumulatif.

Jaksa (penuntut umum) yang menerapkan Undang-Undang No.7 Tahun 1992 sebagai dasar tuntutannya, berbeda keadaan yang dialami jaksa (penuntut umum) S. Santoso, karena ia tidak mendapat dukungan dari penegak hukum yang lainnya dengan dalih pertimbangannya bahwa perbuatan terdakwa tidak dapat ditafsirkan masuk dalam unsur Pasal 49 ayat (1)a dan ayat (2)b UU No. 7 Tahun 1992.

Sesungguhnya apabila dikaji kembali posisi kasus tersebut dimana para terdakwa adalah sebagai pegawai bank, yang melakukan pengurusan kredit pada Bank Duta (sekaligus melakukan pencatatan transaksi kredit) maka secara implisit berarti melakukan perbuatan membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan, laporan, dokumen ataupun kegiatan usaha suatu bank. Oleh karena itu dasar pertimbangan hakim tersebut di atas menurut penulis adalah kurang tepat.

Uraian di atas menunjukkan bahwa penerapan hukum bisnis dalam proses penegakkan hukum belum sepenuhnya dilaksanakan untuk melindungi masyarakat dari tindak pidana bisnis.

2. Sikap dan Pengetahuan Penegak Hukum Menegakan Hukum Pidana Bisnis

Penerapan ketentuan-ketentuan tentang bisnis merupakan konkritisasi atau aplikasi dari kebijakan

hukum pidana terhadap tindak pidana bisnis yang muncul untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat agar dapat mencapai kesejahteraan.

Berhasil tidaknya usaha menegakkan hukum pidana, banyak tergantung dari sikap dan pengetahuan penegak hukum sendiri. Hal ini dikemukakan oleh Abd. G. Hakim Nusantara dan Nasroen Yasabari bahwa "Soal peningkatan kemampuan penegak hukum serta pembinaan mental para penegak hukum, hal tersebut merupakan kunci dari pada soal penegakan hukum itu sendiri. Para penegak hukum perlu memiliki pengetahuan hukum yang cukup sehingga tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan hukum yang ada. Ia harus mengetahui apa yang menjadi tugas dan wewenangnya dan apa yang tidak boleh dilakukannya".¹¹⁾

Untuk mengetahui bagaimana sikap penegak hukum dalam memproses tindak pidana bisnis yang ditanganinya dapat dilihat dalam tabel X berikut ini.

11). Abd.G. Hakim Nusantara dan Nasroen Yasabari, Beberapa Pemikiran Pembangunan Hukum di Indonesia, (Bandung, Alumni 1980), hal. 62

Tabel : X. Sikap Penegak Hukum dalam Memproses
Perkara Tindak Pidana Bisnis

| Lembaga Penegak Hukum | Sikap Penegak Hukum dalam Memproses Tindak Pidana Bisnis | | |
|-------------------------|---|---|---|
| | Proses Penanganan | Proses Pembuktian /Pemeriksaan | Proses Penyelesaian |
| Polisi/ Penyidik | <ul style="list-style-type: none"> - kalau diketahui dilakukan penyidikan - kadang menunggu laporan dari pihak yang dirugikan | <ul style="list-style-type: none"> - berhati-hati karena pelakunya orang-orang pintar/mampu - banyak ditentukan dari atas | <ul style="list-style-type: none"> - tergantung dari hakim yang memeriksa |
| Jaksa/ Penuntut umum | <ul style="list-style-type: none"> - menunggu hasil penyidikan polisi | <ul style="list-style-type: none"> - tergantung alat bukti yang diajukan penyidik | <ul style="list-style-type: none"> - diupayakan untuk membuktikan sesuai alat bukti yang ada |
| Hakim | <ul style="list-style-type: none"> - menunggu pelimpahan perkara dari Jaksa | <ul style="list-style-type: none"> - hakim pasif menilai alat bukti yang diajukan - menggunakan saksi ahli | <ul style="list-style-type: none"> - setiap perkara akan diselesaikan secara tuntas |

Sumber data : Kotabes Semarang
Kejaksaan
Pengadilan Negeri

Tabel di atas memperlihatkan bahwa para penegak hukum masih bersifat pasif bila mengetahui terjadinya tindak pidana bisnis. pada hal menurut undang-undang siapapun mengetahui terjadinya tindak pidana wajib melaporkan kepada pihak yang berwajib sepanjang tindak pidana itu tidak bersifat aduan. Pada umumnya penegak hukum mempunyai sikap atau keinginan yang kuat untuk menyelesaikan setiap tindak pidana bisnis, asalkan terpenuhi bukti-bukti

yang diperlukan untuk memproses dan menyelesaikan tindak pidana itu. Yang rawan dalam penanganan dan pemeriksaan tindak pidana bisnis yang diperlihatkan dalam tabel X diatas adalah kepolisian, dimana terlihat polisi masih sering menunggu laporan dari pihak yang dirugikan baru kemudian melakukan penyidikan. Salah satu alasan yang dikemukakan oleh penyidik adalah karena di kepolisian itu terlalu berat beban, disamping harus menangani tindak pidana yang diatur dalam KUHP, juga harus menangani tindak pidana yang banyak diatur oleh undang-undang lain."¹²⁾

Kemampuan pengetahuan dan ekonomi para pelaku tindak pidana bisnis membuat sikap polisi (penyidik) sangat hati-hati dalam memproses tindak pidana bisnis, ditambah lagi pengaruh dari atas mengingat hubungan antara bawahan dan atasan dalam lembaga kepolisian berdasarkan garis komando sehingga dapat dikatakan apa yang diperintahkan atasan, tidak ada pilihan selain harus dilaksanakan.

Selain sikap, pengetahuan penegak hukum terhadap proses pemeriksaan perkara tindak pidana bisnis dapat pula digambarkan dalam tabel berikut ini.

12). Letda Wasidi, Wawancara Pribadi, Poltabes Semarang, tanggal 17 Maret 1997

Tabel : XI. Pengetahuan Penegak Hukum Terhadap
Proses pemeriksaan Perkara Tindak
Pidana Bisnis

| Lembaga Penegak Hukum | Pengetahuan Penegak Hukum Terhadap Proses Tindak Pidana Bisnis | | |
|-----------------------------|---|--|---|
| | Peraturan Tindak Pidana Bisnis | Cara Pemeriksaan | Cara Penyelesaian |
| Polisi/ Penyidik | terdapat dalam KUHP dan di luar KUHP | diperiksa sebagai tindak pidana biasa/umum | - dilanjutkan ke peng- adilan - dapat di- selesaikan secara ke- keluargaan (damai) |
| Jaksa/ penuntut umum | terdapat dalam KUHP dan di luar KUHP | - diperiksa seba- gai tindak pidana biasa/ umum - dapat diperiksa sebagai tindak pidana khusus | - dilimpahkan ke peng- adilan |
| Hakim | terdapat di dalam KUHP dan di luar | - diproses seba- gai tindak pidana biasa/ umum - tergantung dari bentuk yang di dakwakan | - acara biasa dapat juga acara singkat |

Sumber data : Kotabes Semarang
Kejaksaan
Pengadilan Negeri

Tabel di atas memperlihatkan bahwa semua penegak hukum mengetahui kalau tindak pidana bisnis itu diatur dalam KUHP, tetapi mengenai cara pemeriksaannya masih ada penegak hukum yang belum tahu memisahkan antara tindak pidana bisnis dengan tindak pidana ekonomi, dengan mengatakan tindak

pidana bisnis dapat diperiksa sebagai tindak pidana khusus atau tergantung dari bentuk yang didakwakan, bahkan oleh penyidik ada yang berpendapat bahwa tindak pidana bisnis dapat diselesaikan secara kekeluargaan (damai). Pendapat seperti itu mungkin disebabkan karena dikalangan penyidik belum pernah dilakukan pendidikan khusus (kursus) untuk meningkatkan kemampuan penyidik menangani tindak pidana, khususnya tindak pidana bisnis. Pendapat itu dibenarkan oleh seorang pejabat polisi bahwa memang para penyidik belum pernah dididik khusus untuk menangani delik-delik khusus, termasuk tindak pidana bisnis.

Sikap pasif dari penegak hukum ditambah dengan pengetahuan yang kurang dalam menangani, memeriksa dan menyelesaikan tindak pidana bisnis sebagaimana digambarkan dalam tabel di atas, menyebabkan banyak tindak pidana bisnis yang tidak diproses menurut hukum (secara yuridis), ataupun kalau diproses secara hukum ada kemungkinan tidak proporsional (tidak sesuai dengan keadaan yang seharusnya).

Keadaan penegak hukum seperti di atas, memberi kesempatan kepada para pengusaha yang beritikad buruk untuk melakukan tindak pidana bisnis, sehingga kejahatan tersebut berkembang dengan pesatnya.

C. Prospek Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Bisnis Dimasa Mendatang

Meskipun mendapat kritikan-kritikan dari aliran yang berusaha untuk mengganti hukum pidana dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat, namun tidak sedikit pendapat yang ingin mempertahankan hukum pidana itu. Salah satu pendapat yang hendak mempertahankan penggunaan hukum pidana adalah Marc Ancel dengan mengajukan pertanyaan sebagai berikut :

"Apakah dengan mengadakan hukum tindakan kita tidak mengganti satu sistem hukum pidana dengan tujuh setan tindakan hukum. Sebabnya karena semua keberatan terhadap hukum pidana ternyata berlaku pula terhadap hukum tindakan"¹³⁾.

Sehubungan dengan pendapat tersebut diatas, maka Roeslan Saleh mengatakan¹⁴⁾. "Jadi jika disatu pihak hukum pidana dan peradilan pidana dikatakan masih diragukan kegunaan, sedangkan dilain pihak hukum pidana tidak dapat ditiadakan atau dihapuskan, ataupun diganti dengan yang lain yang dapat membantu kita keluar dari kesulitan, maka tidak ada lain yang dapat dilakukan selain dari pada masih tetap berpegang pada hukum yang mengandung banyak keragu-raguan ini".

Telah beberapa kali dikatakan bahwa peraturan-peraturan yang mengatur mengenai tindak pidana bisnis termasuk hukum pidana ekonomi. Dan hampir dapat

13). Roeslan Saleh, *Segi Lain Hukum Pidana*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 1984), hal 15

14). Ibid. hal. 18

dipastikan bahwa seluruh negara di dunia dalam membangun sistem perekonomian diperlukan ikut campur pemerintah melalui peraturan untuk membangun, menertibkan dan mengembangkan sentra-sentra ekonominya.

Peraturan-peraturan di bidang ekonomi diadakan sesuai dengan sistim perekonomian yang dianut oleh negara yang bersangkutan. Negara yang menganut sistem perekonomian kapitalis, diperlukan peraturan yang bersifat liberal untuk memberikan peluang melakukan persaingan bebas kepada para pelaku ekonomi. Sebaliknya pada negara yang menganut sistem ekonomi yang ketat (tertutup), diperlukan peraturan-peraturan yang bersifat mencegah penguasaan ekonomi oleh perorangan karena dianggap bertentangan dengan kepentingan umum. Demikian pula pada negara-negara yang mengatur sistem perekonomian campuran, membuat peraturan untuk menentukan garis batas yang jelas antara bidang-bidang usaha (ekonomi) yang masih dapat diselenggarakan oleh pelaku-pelaku ekonomi perorangan atau kelompok masyarakat dan bidang usaha (ekonomi) yang harus diselenggarakan oleh negara

Negara Republik Indonesia menurut pengelompokan sistem perekonomian tersebut di atas termasuk dalam perekonomian campuran. Dasar hukum sistem perekonomian seperti itu di negara kita dapat dilihat dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi sebagai berikut :

1. Perekonomian dibangun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.
2. Cabang-cabang produk yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dalam hukum perekonomian seperti itu, jelas memberikan petunjuk tentang ikut campurnya pemerintah untuk mengatur perekonomian melalui peraturan perundang-undangan untuk menumbuhkan, membina dan menertibkan kehidupan ekonomi, sebagaimana yang dikatakan Munir Fuady sebagai berikut :

"Sebenarnya masa depan dari bisnis Indonesia sangat bergantung pada bagaimana bisnis itu diatur. Dan masa depan dari hukum bisnis itu sendiri terletak pada bagaimana para ahli hukum bisnis menginterpretasi eksistensi dan actingnya dalam proses pembangunan ekonomi yang sedang berlangsung.¹⁵⁾

Kebijakan pemerintah menetapkan peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan hukum pidana secara khusus ditujukan sebagai dukungan ketaatan setiap orang untuk melaksanakan kegiatan bisnis sesuai kebijakan umum pemerintah sektor ekonomi.

Kebijakan pemerintah di bidang bisnis masih terdapat pendapat-pendapat yang berbeda di kalangan

15). Munir Fuady, Hukum Bisnis, (Yogyakarta, Liberty, 1990), hal. 6

penegak hukum atau ahli hukum. Di satu pihak ada yang mengatakan bahwa peraturan mengenai tindak pidana bisnis selama sepuluh tahun terakhir ini mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hal ini dapat dilihat dari beberapa peraturan mengenai tindak pidana bisnis yang dikeluarkan oleh pemerintah seperti undang-undang tentang perbankan, merek, paten dan sebagainya yang tidak hanya mengantisipasi kejahatan bisnis di dalam negeri, tetapi juga para pesaing-pesaing bisnis dari luar negeri.

Sementara itu dilain pihak ada yang mengatakan bahwa dewasa ini dunia hukum kita sedang dalam masa desintegrasi. Di satu pihak tatanan hukum kita berasal dari hukum kolonial dan hukum adat, sementara itu hukum yang baru dibentuk belum mampu memenuhi dan menjangkau kejahatan-kejahatan bisnis yang berkembang dalam masyarakat.

Bertolak dari kedua perbedaan pendapat terhadap kebijakan hukum pidana tersebut diatas, maka timbul pertanyaan Bagaimanakah kebijakan hukum pidana terhadap kejahatan bisnis dimasa mendatang ?

Atas pertanyaan itu, meminta kepada kita untuk mengamati beberapa gejala perkembangan hukum pidana baik dalam konsep KUHP (RUUKUHP) maupun perkembangan hukum pidana di luar KUHP dan UU-TPE.

Dalam rancangan kitab Undang-undang Hukum Pidana, kita melihat adanya prospek baru tentang pengaturan-pengaturan yang bukan hanya ditujukan kepada tindak

pidana umum saja tetapi juga terhadap perbuatan pidana yang diatur di luar KUHP seperti ketentuan pidana mengenai kejahatan bisnis. Menurut Muladi "Crime stipulation policy dalam KUHP mendatang (Rancangan KUHP - pen) cukup kompleks. hal yang dipertimbangkan cukup banyak, baik dari segi politik, ekonomi, sosial budaya, hankam, perkembangan teoritis dan empiris dalam bidang hukum pidana, aspek ideologi nasional, kondisi manusia, alam serta tradisi bangsa dan yang tidak kalah pentingnya adalah kecenderungan-kecenderungan international yang diakui oleh masyarakat beradab".¹⁶⁾ Selanjutnya dikatakan bahwa perhatian terhadap tindak pidana di luar KUHP sangat penting, karena peraturan-peraturan tersebut dapat diidentifikasi sebagai perkembangan.

Salah satu kemajuan hukum pidana dimasa mendatang (rancangan KUHP baru) adalah dituangkannya konsep tindak pidana berdasarkan pengertian materiel, menggantikan konsep tindak pidana berdasarkan pengertian formal dalam KUHP yang berlaku sekarang ini. Dengan konsep tindak pidana berdasarkan pengertian materiel berarti bahwa pernyataan sebagai suatu tindak pidana tidak semata-mata terpaku pada apa yang dinyatakan dalam undang-undang, tetapi harus juga

16). Muladi, Perkembangan Tindak Pidana Dalam KUHP Mendatang (Makalah disampaikan dalam rangka penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi untuk Dosen-dosen PTN/PTS se Indoensia), Semarang 12-13 Januari 1993, hal. 2.

melihat bagaimana pendapat masyarakat mengenai perbuatan itu. dengan pembatasan bahwa berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat itu, hanya untuk delik yang tidak ada bandingnya (persamaannya) atau tidak telah diatur dalam KUHP.

Mengingat kejahatan bisnis senantiasa berkembang lebih cepat, sehingga menurut hemat penulis konsep legalitas yang berdasarkan pengertian formal dan materiel seperti yang tersebut dalam Pasal 1 ayat (3) Rancangan KUHP, dapat menampung atau menjaring perkembangan kejahatan bisnis. Walaupun perbuatan bisnis menyimpang itu belum diatur dalam undang-undang, yang penting bahwa perbuatan bisnis itu dinilai oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat yang bersangkutan.

Yang sering menjadi masalah juga dalam kejahatan bisnis adalah pertanggung jawaban pidana terhadap perbuatan yang dilakukan oleh seorang pegawai perusahaan atas suruhan atau secara tidak langsung disuruh oleh pimpinan perusahaan dalam hal demikian jarang sekali pimpinan perusahaan mempertanggung jawabkan atau ikut bertanggung jawab atas perbuatan bawahannya. Sebagaimana dikatakan Amar Bhide dan Haward H. Stevenson dalam Harvard Business Review edisi September 1990, bahwa "memang sudah kodratnya para eksekutif, khususnya dari kalangan bisnis untuk selalu terlihat tak bersalah sebelum akhirnya betul-

betul terbukti (innocent until proven guilty), dan menurutnya bukan kebiasaan para eksekutif bisnis untuk memberi perhatian pada nasib orang lain.¹⁷⁾

Akan tetapi dengan dianutnya pertanggung jawaban pengganti yang disebut juga "Vicarious Liability" dalam konsep KUHP (RUUKUHP), maka seorang atasan yang terbukti memberikan perintah baik langsung maupun tidak langsung kepada bawahannya untuk melakukan tindak pidana bisnis tidak dapat melepaskan diri dari pertanggung jawaban pidana tersebut. Hal ini dapat dibaca dalam Pasal 39 Rancangan KUHP sebagai berikut :

Dalam hal-hal tertentu, orang juga bertanggung jawab atas perbuatan orang lain jika ditentukan demikian oleh peraturan perundang-undangan"

Dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-undang No. 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dinyatakan, "Tiada seorang jua pun dapat dijatuhi pidana kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang mendapat keyakinan bahwa seorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang dituduhkan atas dirinya." Dengan demikian "Vicarious Liability" (Pertanggung jawaban pengganti) bertentangan dengan asas kesalahan sebagaimana yang dikatakan oleh Schaffmeister bahwa "dianutnya doktrin Strict Liability dan Vicarious Liability

17). Adrianus Meliala, *Menyingkap Kejahatan Krah Putih*, (Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1993) hal. 124.

bertentangan dengan Mens-rea (Asas kesalahan)¹⁸⁾. Tetapi penulis sependapat dengan Barda Nawawi Arief yang mengatakan bahwa "Perkecualian atau penyimpangan dari suatu asas jangan dilihat semata-mata sebagai suatu pertentangan (kontradiksi) tetapi harus pula dilihat sebagai pelengkap (complement) dalam mewujudkan asas keseimbangan"¹⁹⁾.

Masih dalam persoalan pertanggung jawaban pidana, bahwa di dalam KUHP, masih dianut asas umum bahwa suatu tindak pidana hanya dapat dilakukan oleh manusia (naturlijke persoon) sehingga fiksi badan hukum (rechts persoon) tidak berlaku dalam hukum pidana. Namun dalam beberapa peraturan perundang-undangan kita yang berada di luar KUHP dan UU-TPE mulai menyimpang dari asas umum tersebut. Hal ini dapat dilihat dalam :

1. Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang mengatakan (Pasal 46 ayat (2).

"Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk perseroaan terbatas, perserikatan. Yayasan atau korporasi, maka penuntutan terhadap badan-badan dimaksud dilakukan terhadap mereka yang memberikan perintah melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau

18). Barda Nawawi Arief, Pokok-pokok Pikiran yang Terdapat Dalam Konsep KUHP Baru, Semarang 1993), hal 5

19). Ibid

terhadap kedua-duanya.

2. "Undang-undang No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal Pasal 34 ayat (1) :

"Suatu perbuatan kejahatan atau pelanggaran yang berdasarkan undang-undang ini diancam hukuman apabila dilakukan oleh suatu badan usaha, maka tuntutan atas hukuman ditujukan kepada :

- a. Pengurus apabila berbentuk badan usaha
- b. Sekutu aktif apabila berbentuk persekutuan/ perkumpulan orang-orang
- c. Pengurus, apabila berbentuk yayasan
- d. Wakil atau kuasanya di Indonesia apabila kantor pusatnya berkedudukan di luar wilayah Republik Indonesia.

Berdasarkan kedua Undang-undang tersebut diatas, ternyata pertanggung jawaban pidana terhadap kejahatan bisnis telah mengalami kemajuan yaitu hukum telah mengakui bahwa perusahaan (badan hukum) dapat melakukan perbuatan pidana hanya saja pertanggung jawaban pidananya masih tetap dibebankan kepada pengurus. Hal demikian ini menurut A. Pohan adanya keraguan dari pembuat undang-undang untuk menempatkan korporasi (badan hukum) sebagai subjek yang dapat dibebani tanggung jawab pidana²⁰⁾.

20). Mardjono Reksodiputro. *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan* (Kumpulan Karangan, Buku I), (Jakarta, Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, 1984) hal 70.

Menurut hemat penulis, bahwa meskipun demikian telah terdapat pemikiran-pemikiran dari pembuat undang-undang untuk membebankan tanggung jawab pidana kepada suatu badan hukum. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 46 Konsep RUUKUHP yang berbunyi :

"Jika suatu tindak pidana dilakukan oleh atau untuk suatu korporasi maka penuntutan dapat dilakukan dan pidananya dijatuhkan terhadap korporasi itu sendiri, atau korporasi dan pengu-rusnya, atau pengurusnya saja".

Dalam hubungan itu Mardjono Reksodiputro berpendapat bahwa dalam hal kejahatan korporasi (sebagaimana diuraikan dan dibatasi diatas), maka sifat pertanggung jawaban pidana korporasi adalah mutlak selama tuntutan pidana dapat dibuktikan²¹⁾.

Kemajuan lain yang terlihat dalam "konsep KUHP baru" adalah ancaman pidana denda yang dirumuskannya adalah cukup tinggi. Ancaman pidana tinggi dapat dianggap efektif untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana bisnis yang berkembang sekarang ini. Dan penetapan sanksi pidana seperti itu lebih banyak mengandung aspek perlindungan masyarakat dari pada perlindungan individu.

Apabila diperhatikan pelaku dan motivasi dilakukannya dalik-dalik bisnis, maka seyogyanya penetapan sanksi pidana bisnis itu lebih berorientasi kepada perlindungan masyarakat, karena para pelaku kejahatan bisnis pada umumnya orang-orang pintar,

21). Mardjono Reksodiputro, Op.cit, hal 73

orang yang mengetahui dan mengerti mengenai perbuatan yang dilakukannya, sehingga tidak perlu disadarkan dengan melakukan pembinaan untuk menjadikan pelaku menjadi baik dan berguna, tetapi yang penting adalah penjeratan agar tidak melakukan perbuatan itu. Begitu pula motivasi dilakukannya perbuatan itu, semata-mata karena ingin mendapatkan keuntungan dengan cara melawan hukum, sehingga penjatuhan pidana denda yang tinggi itu merupakan pengembalian kerugian yang dialami oleh masyarakat atau negara yang berarti pemulihan keseimbangan nilai-nilai yang terganggu oleh perbuatan pidana tadi.

Dalam GBHN, sebagaimana yang termuat dalam ketetapan MPR No. II/MPR/1993 antara lain disebutkan bahwa :

- "c. Dalam pembangunan dan pembinaan hukum ini akan dilanjutkan usaha-usaha untuk :
1. Meningkatkan dan menyempurnakan pembinaan hukum nasional dalam rangka pembaharuan hukum, dengan antara lain mengadakan kodifikasi serta unifikasi hukum di bidang-bidang tertentu dengan memperhatikan kesadaran hukum yang berkembang dalam masyarakat.
 2. Menetapkan kedudukan dan peranan badan-badan penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenangnya masing-masing.
 3. Memantapkan sikap dan perilaku para penegak hukum serta kemampuannya dalam rangka meningkatkan citra dan wibawa hukum serta aparat penegak hukum.²²⁾

Memperhatikan kerangka pembangunan hukum tersebut di atas, ternyata bahwa permasalahan hukum tidak hanya

22). Mulyana, W Kusumah, Perspektif Teori dan Kebijakan Hukum, (Jakarta, CV. Rajawali, 1986), hal 25

menyangkut mengenai materi undang-undang, tetapi lebih dari itu adalah masalah penegakan hukum yang tentu saja tidak terlepas dari penegak hukumnya.

Kebijakan hukum pidana bisnis sebagai bagian dari kebijakan-kebijakan hukum pidana tidak terlepas dari perhatian kerangka pembangunan hukum seperti tersebut di atas. Hal ini terlihat selama 12 tahun terakhir ini badan legislatif telah banyak sekali menghasilkan peraturan-peraturan yang memuat ketentuan-ketentuan pidana bisnis untuk menggantikan peraturan-peraturan yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan bisnis. Namun masih terdapat bagian dari pembangunan hukum pidana yang tertinggal yaitu mengenai masalah penegakan hukumnya.

Meskipun sudah banyak tulisan-tulisan dan seminar-seminar baik ditingkat lokal maupun ditingkat nasional bahkan ditingkat internasional tentang bahaya yang ditimbulkan oleh tindak pidana bisnis, tetapi pada kenyataannya pemerintah hanya menanggapi secara substansial (isi) undang-undang yang mengaturnya sedangkan dari segi penegakan hukumnya belum ada tanggapan yang serius dari badan legislatif atau eksekutif.

Sebagaimana kita ketahui bahwa untuk mencapai tujuan hukum pidana yang sudah direncanakan, selain kebenaran dalam menetapkan (merumuskan) perbuatan dan sanksi pidana dalam undang-undang, harus pula didukung dengan kebijakan mengaplikasikan atau mengoperasionalisasikan hukum pidana itu. Kedua tahap

kebijakan itu merupakan suatu rangkaian yang tak dapat dipisahkan satu sama lain. Hal ini dikatakan oleh Barda Nawawi Arief bahwa "Tahap kebijakan legislatif yang dapat juga disebut tahap formulasi, merupakan salah satu mata rantai dari rencana penegakan hukum khususnya merupakan bagian dari proses konkretisasi pidana,"²³⁾. Oleh karena itu antara kebijakan formulasi dan kebijakan aplikasi/konkritisasi harus berjalan sejalan, atau dengan kata lain harus saling mendukung dan saling melengkapi dalam mencapai tujuan hukum pidana.

Salah satu hambatan dalam mewujudkan atau mengaplikasikan ketentuan-ketentuan pidana bisnis yang telah ditetapkan, khususnya pada tingkat penyidikan adalah keberadaan polisi sebagai penegak hukum dan sebagai anggota ABRI. Peranan dan kedudukan seperti itu sebenarnya komplikasi, karena disatu pihak peranannya sebagai penegak hukum ia harus bebas dari pengaruh kekuasaan lain (memegang supremasi hukum), dilain pihak polisi sebagai anggota ABRI harus tunduk pada garis komando yang berlaku pada instansinya. Oleh karena itu wajar kalau ada yang mengusulkan agar lembaga penegak hukum (penyidik) disamakan kedudukannya dengan penegak hukum lainnya terutama dalam menangani tindak pidana bisnis.

23). Barda Nawawi Arief, Op.cit. hal. 64

BAB IV

P E N U T U P

Kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana bisnis termasuk bagian dari kebijakan kriminal yang membahas bagaimana menanggulangi tindak pidana bisnis dengan menggunakan hukum pidana. Dengan demikian tesis ini membahas tentang undang-undang yang mengatur tindak pidana bisnis dan penegakannya oleh para penegak hukum.

Tujuan utama politik kriminal (criminal policy) adalah untuk melindungi masyarakat. Dan melindungi masyarakat agar dapat mencapai kesejahteraannya merupakan tujuan kebijakan sosial. Dengan demikian kebijakan kriminal adalah bagian kebijakan sosial, ini berarti pula bahwa kebijakan hukum pidana sebagai bagian kebijakan kriminal juga sekaligus menjadi bagian dari kebijakan sosial yaitu bertujuan untuk melindungi masyarakat dari tindak pidana bisnis.

Kebijakan hukum pidana (penal policy) merupakan kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan hukum pidana yang dikehendaki, yang diperkirakan dapat digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung di dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan. Ruang lingkup masalah kebijakan hukum pidana yang dibahas dalam tesis ini meliputi tiga masalah pokok yang berkaitan dengan tindak pidana bisnis :

1. Bagaimana ruang lingkup kebijakan hukum pidana yang ada dalam KUHP dan diluar KUHP dan UU-TPE dalam upaya menanggulangi tindak pidana bisnis.
2. Seberapa jauh kasus-kasus yang terjadi selama ini diputus oleh pengadilan dengan hukum pidana dan permasalahan hukum apakah yang timbul dalam praktek sehubungan dengan penegakan kebijakan hukum pidana.
3. Usaha atau kebijakan apakah yang dapat diambil dalam mengatasi kesenjangan yang timbul didalam praktek penegakan kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana bisnis.

Dengan demikian tesis ini membahas kebijakan hukum pidana pada tahap formulasi (kebijakan legislatif) terhadap tindak pidana bisnis yang ada di KUHP dan di dalam undang-undang diluar KUHP serta UU-TPE. Tetapi karena untuk mencapai tujuan hukum pidana tidak dapat dilepaskan dari penegakan hukum pidana yang sudah diformulasikan dalam undang-undang maka pembahasan terhadap penegakan ketentuan hukum pidana bisnis dalam undang-undang juga dilakukan.

A. Kesimpulan

Berdasar ruang lingkup masalah dan substansi pembahasan dalam bab terdahulu, maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan dan saran sebagai berikut :

1. Tindak pidana bisnis yang diatur dalam KUHP cukup luas yaitu meliputi tindak pidana bisnis dalam bidang

pendirian perusahaan, dalam bidang produksi dan dalam bidang pemasaran.

Begitu pula kepentingan yang hendak dilindungi cukup luas meliputi kepentingan seluruh lapisan masyarakat yaitu, kepentingan masyarakat (konsumen), kepentingan pengusaha sendiri dan kepentingan negara, sehingga ruang lingkup dan perlindungan seperti itu dalam KUHP (walaupun KHUP dibuat pada tahun 1915) masih tetap relevan dengan perkembangan tindak pidana bisnis dewasa ini. Hanya saja, untuk mencapai tujuan sebagaimana disebutkan diatas, KUHP kurang efektif karena perumusan perbuatan yang termasuk tindak pidana bisnis tidak dilakukan secara rasional, sehingga perumusan itu semata-mata ditujukan kepada perlindungan masyarakat (tertib masyarakat) tanpa mempertimbangkan pertumbuhan dan perkembangan usaha bisnis itu sendiri.

Selain itu, KUHP terlalu banyak menggunakan pidana penjara yang dirumuskan secara tunggal dibandingkan dengan yang dirumuskan secara alternatif yang berarti bahwa, penetapan sanksi pidana dalam KUHP lebih mengutamakan perampasan kemerdekaan secara mutlak dan tidak memberikan kebebasan kepada hakim untuk memilih sanksi pidana yang cocok dikenakan kepada si pelaku.

Pidana denda secara alternatif yang ditetapkan dalam KUHP hanya ditujukan pada tindak pidana bisnis yang tergolong sangat ringan, ringan dan sedang.

Itupun sangat rendah jumlahnya, sehingga dianggap tidak seimbang untuk suatu tindak pidana yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan.

2. Undang-Undang yang mengatur tindak pidana bisnis diluar KUHP dan UU-TPE umumnya dibuat untuk menggantikan undang-undang yang sudah lama, oleh karena itu lebih banyak diselesaikan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan hukum pidana itu sendiri.

Tindak pidana bisnis yang diatur dalam undang-undang diluar KUHP dan UU-TPE meliputi tindak pidana bisnis dalam bidang pendirian perusahaan dalam bidang produksi dan dalam bidang pemasaran. Perbuatan yang termasuk tindak pidana dalam bidang kegiatan bisnis tersebut diatas dirumuskan melalui pendekatan kebijakan dan pendekatan nilai. Hal ini dapat dilihat dalam beberapa perbuatan yang dilarang terhadap adanya keseimbangan antara kepentingan untuk memajukan atau mengembangkan usaha-usaha bisnis dengan kepentingan perlindungan masyarakat, keseimbangan antara tertib masyarakat dengan pemulihan keseimbangan nilai-nilai ekonomi yang terganggu dalam masyarakat.

Begitu pula kepentingan yang hendak dilindungi cukup luas yaitu, meliputi kepentingan masyarakat (konsumen), pengusaha dan kepentingan negara. Sanksi pidana yang diancamkan terhadap tindak pidana bisnis diluar KUHP dan UU-TPE sangat bervariasi yaitu pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana tambahan.

Meskipun masih mengikuti pola penetapan pidana yang ada dalam KUHP yaitu lebih banyak pidana penjara dan denda, akan tetapi perumusannya lebih banyak dilakukan secara alternatif dan kumulatif-alternatif serta ancaman pidana denda yang tergolong sangat tinggi sehingga undang-undang diluar KUHP dan UU-TPE cukup memadai dan dapat menunjang usaha penanggulangan tindak pidana bisnis. Usaha penanggulangan tersebut dapat dikatakan sangat serius dan bersungguh-sungguh karena dalam beberapa undang-undangnya telah ditetapkan bahwa suatu badan hukum dapat melakukan suatu tindak pidana bisnis dan untuk itu kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

3. Tindak pidana bisnis yang terjadi selama ini dapat dikatakan cukup banyak baik yang diatur dalam KUHP maupun yang diatur dalam undang-undang diluar KUHP dan UU-TPE, hanya saja sebagian dari tindak pidana bisnis itu tidak terdaftar di kepolisian sebagai instansi penegak hukum pertama yang menerima adanya tindak pidana bisnis. Hal ini disebabkan karena pihak-pihak yang dirugikan enggan melaporkan tindak pidana bisnis dengan alasan memakan waktu dan biaya yang banyak.

Dari semua tindak pidana bisnis (ada 8) yang terdaftar dalam kepolisian tidak seluruhnya atau sebagian kecil saja (ada 2) perkara yang dilanjutkan kepada jaksa penuntut umum. Dan dari dua perkara itu hanya satu perkara yang dilanjutkan pemeriksaannya di pengadilan. Keadaan perkara seperti itu membuktikan

bahwa penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana bisnis tidak berjalan lancar, hal ini disebabkan beberapa faktor :

- a. Kurangnya kordinasi antara instansi yang terkait dengan para penegak hukum maupun antara para penegak itu sendiri dalam menangani tindak pidana bisnis sehingga penyelesaian tindak pidana tersebut dilakukan menurut instansi masing-masing.
- b. Kurangnya persepsi yang sama antara penegak hukum mengenai peraturan-peraturan tindak pidana bisnis yang akan diterapkan kepada suatu perkara, sehingga keputusan yang dihasilkan sering kali tidak memuaskan penegak hukum yang lain dan kadang tidak sesuai dengan perasaan keadilan masyarakat.
- c. Adanya sikap pasif dan ragu-ragu dari penegak hukum khususnya polisi untuk mengusut suatu tindak pidana bisnis dengan alasan bahwa penanganan suatu tindak pidana bisnis oleh polisi dianggap sebagai beban yang cukup berat dan pelaku tindak pidana bisnis umumnya orang-orang pandai dan berekonomi kuat sehingga mudah mempengaruhi oknum tertentu untuk memerintahkan agar tindak pidana bisnis tidak diproses sebagaimana mestinya.
- d. Masih ada penegak hukum yang belum mengetahui sepenuhnya proses pemeriksaan tindak pidana bisnis sehingga sering penegak hukum memproses dan menyelesaikan tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam undang-undang.

4. Untuk mengatasi kesenjangan yang timbul dalam praktek penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana bisnis, maka perlu ditempuh usaha atau langkah-langkah sebagai berikut :

a. Mengadakan peninjauan kembali kebijakan perundang-undangan pidana dibidang penanggulangan tindak pidana bisnis dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a.1. Asas legalitas yang berdasarkan pengertian formal dan materiel, artinya suatu perbuatan dipandang sebagai tindak pidana tidak hanya apabila telah dicantumkan didalam undang-undang, tetapi juga apabila masyarakat menganggap bahwa perbuatan itu adalah tindak pidana bisnis dan sepanjang belum diatur dalam undang-undang. Konsep seperti ini sesuai dengan sifat tindak pidana bisnis yang senantiasa berubah dan berkembang dengan cepat, sehingga kegiatan-kegiatan yang merugikan masyarakat (konsumen), pengusaha dan negara dapat dijarang melalui konsep pengertian tindak pidana secara materiel tanpa harus menambah undang-undang yang sudah ada.

a.2. Bukan saja orang yang dapat menjadi subyek hukum, akan tetapi juga suatu badan hukum hendaknya dapat menjadi subyek hukum. Dengan demikian perusahaan dapat melakukan tindak

pidana bisnis dan dapat dimintai pertanggung jawaban pidana.

a.3. Asas pertanggung jawaban pengganti (vicarious liability) yang dapat menjaring seseorang pimpinan perusahaan yang senantiasa bersembunyi dibelakang bawahannya dalam melakukan tindak pidana bisnis.

a.4. Mengingat akibat merosotnya dan majunya perkembangan bisnis dapat berdampak negatif kepada masyarakat (konsumen), perusahaan dan negara maka perumusan perbuatan tindak pidana bisnis dilakukan dengan pendekatan rasional disamping pendekatan nilai.

b. Menertibkan badan-bahan penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenangnya masing-masing serta meningkatkan kemampuan dan kewibawaan aparat penegak hukum.

B. Saran

1. Mengingat KUHP dibuat pada tahun 1915 yang banyak dipengaruhi oleh aliran klasik maka disarankan agar dilakukan reorientasi terhadap ketentuan-ketentuan tindak pidana bisnis dalam KUHP terutama mengenai kebijakan penetapan sanksi pidananya seperti jenisnya, perumusannya dan jumlah pidana dendanya supaya disesuaikan dengan perkembangan tindak pidana bisnis yang terjadi dewasa ini.

2. Mengingat hambatan-hambatan penegakan hukum, bersumber dari penegak hukum sendiri dan dari luar penegak hukum maka disarankan :

- a. Melakukan pendidikan yang berupa penataran-penataran, Kursus-kursus atau pelatihan-pelatihan kepada para penegak hukum mengenai kedudukan dan cara memproses tindak pidana bisnis.
- b. Mengadakan perangkat aturan atau mengefektifkan aturan-aturan yang sudah ada yang memberikan sanksi kepada penegak hukum yang memproses atau memeriksa tindak pidana bisnis tidak sebagaimana mestinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, H. Ilmu Hukum. Teori Hukum Dan Ilmu Perundang-Undangan, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1995.
- , Beberapa Aspek tentang Pembangunan Hukum Nasional, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1995.
- Affandi, Wahyu, Hakim Dan Penegak Hukum, Bandung, Alumni, 1984.
- Alkostar, Artidjo dan Amin M. Sholeh, Pembangunan Hukum Dalam Perspektif Politik Hukum Nasional, Jakarta, CV Rajawali, 1996.
- Darus Badrulzaman, Mariam, Aneka Hukum Bisnis, Bandung, Alumni, 1994.
- Dirdjosisworo, Soedjono, Kejahatan Bisnis, (Orientasi dan Konsepsi), Bandung, Mandar Maju, 1994
- Faure MG, Oudijk dan Schaffmeister, Kekhawatiran Masa Kini, (terjemahan), Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1994.
- Sumbayak, Andisman. F.S., Beberapa Pemikiran ke Arah Pemantapan Penegakan Hukum, Jakarta, IND-HILL-CO, 1986.
- Fuady, Munir, Hukum Bisnis, Yogyakarta, Liberty, 1990.
- G. Nusantara, Abdul Hakim Dan Yasabari Nasrum, Beberapa Pemikiran Pembangunan Hukum di Indonesia, Bandung, Alumni, 1986.
- , Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Pelaksanaannya, Jakarta, Jambatan, 1986.
- Hamzah, A, Perkembangan Hukum Pidana Khusus, Jakarta, Rineka Cipta, 1991.
- , Hukum Pidana Ekonomi, Jakarta, Erlangga, 1983.
- , dan Siti Rahayu, Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pidana di Indonesia, Jakarta, Akademika Press-Indo, 1983.

- Hartono, Sunaryaty, Politik Hukum menuju Satu Sistem Hukum Nasional, Bandung, Alumni, 1991.
- _____, Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia, Jakarta, Departemen Kehakiman, 1982.
- Hulsman, ML. HC, Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Perbandingan Hukum (terjemahan), Jakarta, CV. Rajawali, 1984.
- Kansil, C.S.T, Pokok-Pokok Hukum Perindustrian di Indonesia, Jakarta, IND-HILL-CO, 1986.
- Koeswadi, Hermin Hadiati, Perkembangan Macam-macam Pidana, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1995.
- Loqman, Loebby H, Aspek Hukum Pidana Tentang Perlindungan Konsumen, (Makalah Seminar Nasional Kriminologi), Semarang, 1994.
- Lubis, T Mulya, Hukum dan Ekonomi, Jakarta Pustaka Sinar Harapan, 1992.
- Lubis, T Mulya dan M Buxbaum Richard, Perana Hukum Dalam Perekonomian di Negara Berkembang, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 1986.
- Maspaung, Ledent, Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Ekonomi, Jakarta, Sinar Grafika, 1995.
- Marshall B. Clinard dan Peter C. Yeager, Corporate Crime, New York, The Free A Division of Macmillan CO. Inc, 1980.
- Meliala, Adrianus, Menyingskap Kejahatan Krah Putih, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1993.
- Mertokusumo, S, Mengenal Hukum, (suatu pengantar), Yogyakarta, Liberty, 1986.
- Moh, Anwar HAK, Hukum Pidana di Bidang Ekonomi, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1990.
- Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta, PT. Bina Aksara, 1985.
- _____, Membangun Hukum Pidana, Jakarta, PT. Bina Aksara, 1985.
- _____, Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia, Jakarta, PT. Bina Aksara, 1985.

- Muladi dan Nawawi Arief Barda, Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana, Bandung, Alumni, 1992.
- _____, Bunga Rampai Hukum Pidana, Bandung, Alumni, 1992.
- Muladi, Ruang Lingkup Penegakan Hukum Pidana Dalam Konteks Politik Kriminal, Disampaikan dalam rangka penataran hukum pidana di Lampung, tanggal 4 s/d 23 Juli, 1986.
- Nasution, Az. Konsumen Dan Hukum, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1995.
- Nasution, S. Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif, Bandung, Tarsito, 1996.
- Nawawi Arief, Barda, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1996.
- _____, Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara, Semarang, CV. Ananta, 1994.
- _____, Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) Bahan Penataran Kriminologi, Bandung, FH-Universitas Katolik Parahyangan, 1991.
- _____, Perbandingan Hukum Pidana, Jakarta, Rajawali Press, 1990.
- _____, Pelengkap Bahan Kuliah Hukum Pidana I, Semarang, Yayasan Sudarso, 1990.
- Packer, Herbert L, The Limits of Criminal Sanction, Book II, Standford: Standford University Press, 1968.
- Prodjohanidjojo, Martiman, Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Jakarta, Peradnya Paramita, 1997.
- Purnomo, Bambang, Kapitaselektta Hukum Pidana, Yogyakarta, Liberty, 1988
- _____, Pertumbuhan Hukum Penyimpangan di Luar Kodifikasi Hukum Pidana, Jakarta, Bina Aksara, 1984.
- Rahardjo, Satjipto, Penjahat-Penjahat Abad ke-20, Suara Pembaruan, Tanggal 29 Juni 1991.

- _____. Ilmu Hukum. Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1991.
- Reksodiputro, Mardjono, Kemajuan Pembangunan Ekonomi Dan Kejahatan, Jakarta, Lembaga Kriminologi, Universitas Indonesia, 1994.
- Sahetapy, JE, Kejahatan Korporasi, Bandung, PT Erisko, 1994.
- Saleh, Roeslan, Segi Lain Hukum Pidana, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1994.
- _____. Perbuatan Yang Menjurus Pada Tindak Pidana Perbankan (Makalah Seminar), Semarang, 1990.
- _____. Pikiran-Pikiran tentang Pertanggung jawab Pidana, Jakarta, Ghalia Indoensia, 1982.
- _____. Schaff Mister, D, Hukum Pidana (terjemahan), Yogyakarta, Liberty, 1995.
- Simatupang, Richard Burton, Aspek Hukum Dalam Bisnis, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 1995.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta, CV. Rajawali, 1985.
- _____. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta, CV. Rajawali, 1983.
- Soejono, Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia, Jakarta, Rinika Cipta, 1995
- Soehardjo, Ss, Politik Hukum dan Pelaksanaannya Dalam Negara Republik Indonesia, Semarang, FH-UNDIP, Tanpa Tahun.
- Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung, Alumni, 1986.
- _____. Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat, Bandung, Sinar Baru, 1983.
- _____. Hukum dan Hukum Pidana, Bandung, Alumni, 1977.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1988.

- Sugandi. R. KUHP dan Penjelasannya, Surabaya, usaha nasional, 1980.
- Sumarni, Murti dan John Soeprihanto. Pengantar Bisnis, Yogyakarta, Liberty, 1987.
- Sumantoro, Aspek-Aspek Pidana di Bidang Ekonomi, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1990.
- Sunggono, Bambang. Hukum dan Kebijaksanaan Publik, Jakarta, Sinar grafika, 1984.
- Sunyoto, Y. Hukum Perbankan di Indonesia, Surakarta, Sebelas Maret, 1995.
- Suparmi, Ninik. Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan, Jakarta, Sinar Grafika, 1993.
- Sutherland dan Cressey. Hukuman dan Perkembangan Hukum Pidana (Terjemahan), Bandung, Transito, 1974.
- Toffler. Alvin. Kelutan Dan Gelombang, (terjemahan), Jakarta, PT. Panca Simpati, 1987.
- Tresna, R. Asas-Asas Hukum Pidana, Bandung, Universitas Pajajaran, 1959.
- Van Gerven, W. Kebijaksanaan Hakim, Jakarta, Erlangga, 1990
- Wahid Abdul dan Sunardi. Quah Vadis Penegakan Hukum, Bandung, Tersitoh, 1995.
- Waluyo. Bambang. Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika, 1992.
- Wibawa, Samudra. Kebijakan Publik, Jakarta Intermedia, 1994.
- Widjanarto. Hukum Dan Ketentuan Perbankan di Indonesia, Jakarta, Ghalia, 1995.
- W Kusumah, Mulyana. Perspektif Teori Dan Kebijakan Hukum, Jakarta, CV. Rajawali, 1986.
- TAP MPR No. II/MPR/1993, Tentang Garis-garis Besar Haluan Negara, 1993.
- Undang-Undang Dasar 1945. P4 dan GBHN (TAP MPR/NO. II/MPR/1993).
- Indonesia Rancangan Konsep KUHP Baru (Buku I), Jakarta, Departemen Kehakiman RI, 1987/1988.